



LAPORAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA TAHUN 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SURABAYA**



LAPORAN KINERJA

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SURABAYA**

TAHUN 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SURABAYA**


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Surabaya Tahun 2020 merupakan wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kota Surabaya sebagai penyelenggara negara. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan laporan ini adalah untuk menciptakan transparansi kinerja BPS Kota Surabaya sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS Kota Surabaya.

Dalam laporan ini tertuang informasi kuantitatif capaian kinerja terhadap target yang tercermin pada indikator utama kinerja utama BPS Kota Surabaya yang telah ditetapkan pada tahun 2020, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya (2019), serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Surabaya tahun 2019 dan 2020. Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan sebagai bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini kami ucapkan terimakasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang sangat kami hargai.

Surabaya, 25 Pebruari 2021
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya,



Agus Budi Santoso, SE
NIP. 19650816 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi.....	3
1.4 Sumber Daya Manusia BPS Kota Surabaya	5
1.5 Potensi Dan Permasalahan	8
1.5.1 Potensi	8
1.5.2 Permasalahan	11
1.6 Sistematika Penyajian Laporan.....	15
Bab II Perencanaan Kinerja.....	16
2.1 Rencana Strategis BPS Kota Surabaya 2020-2024.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Surabaya Tahun 2020	28
Bab III Akuntabilitas Kinerja	33
3.1 Capaian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2020	34
3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan	34
3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran	41
3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2020 terhadap tahun 2015-2019	52
3.3 Prestasi BPS Kota Surabaya Tahun 2020	52
3.4 Kegiatan Prioritas BPS Kota Surabaya 2020	53
3.4.1 Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilkerstat	53
3.4.2 Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Tanaman Pangan	60
3.4.3 Kegiatan Sakernas	63
3.4.4 Pelaksanaan Susenas	65
3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	66
3.6 Upaya Efisiensi di BPS Kota Surabaya Tahun 2020	67
3.6.1 Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2020	67
Bab IV Penutup.....	69
4.1 Tinjauan Umum.....	69
4.2 Tantangan dan Kendala Utama.....	70
4.3 Saran Tindak Lanjut.....	70

Lampiran-lampiran:

1. Susunan Organisasi	73
2. Rencana Strategis (RS)	74
3. Perjanjian Kinerja (PK)	75
4. SDM BPS Kota Surabaya	77
5. Kegiatan BPS	82
6. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2020	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi SDM BPS Kota Surabaya Menurut Jenis Jabatan	7
Tabel 2	Komposisi SDM BPS Kota Surabaya Menurut Tingkat Pendidikan	7
Tabel 3	Pernyataan Visi dan Misi BPS 2020-2024.....	18
Tabel 4	Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2020-2024	21
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Strategis BPS	24
Tabel 6	Perjanjian Kinerja BPS kota Surabaya Tahun 2020	30
Tabel 7	Target Realisasi dan Capaian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2020.....	34
Tabel 8	Hasil Capaian Sasaran Strategis Tujuan Pertama.....	42
Tabel 9	Hasil Capaian Sasaran Strategis Tujuan Kedua	47
Tabel 10	Hasil Capaian Sasaran Strategis Tujuan Ketiga.....	48
Tabel 11	Hasil Capaian Sasaran Strategis Tujuan Keempat	49
Tabel 12	Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Komposisi SDM BPS Kota Surabaya Menurut Tingkat Pendidikan	6
Gambar 2	Visi dan Misi BPS Kota Surabaya 2020-2024	17
Gambar 3	Nilai Inti BPS Kota Surabaya	19
Gambar 4	Tampilan Website BPS Kota Surabaya	51
Gambar 5	Piagam Penghargaan WBK dari BPS RI	52
Gambar 6	Piagam Penghargaan Pengelolaan Website dari BPS Provinsi	53
Gambar 7	Piagam Penghargaan Performa Satker Dengan Penanganan <i>Under coverage</i> Dari BPS Provinsi Jatim	53
Gambar 8	Plt. Kepala Kantor Dengan Jajaran Staf di Kecamatan Rungkut	55
Gambar 9	Koordinasi Kepala BPS Kota Surabaya dengan Pemkot	56
Gambar 10	Pencacah Melaksanakan Ubinan	63

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Statistik No.16 Tahun 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyelenggarakan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPS membentuk Kantor Perwakilan BPS di setiap Provinsi yang merupakan instansi vertikal.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya merupakan salah satu lembaga perwakilan BPS di daerah. BPS Kota Surabaya mempunyai tugas pokok menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya BPS Kota Surabaya telah menuangkan rencana kerja dan dirangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024. Hal ini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan BPS selaras dengan arah dan tujuan RPJMN 2020-2024.

Untuk memberikan arah tahunan bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan, BPS Kota Surabaya telah pula menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi BPS Pusat yang dilaksanakan setiap tahun.

Salah satu tujuan yang ditetapkan oleh BPS yang tertuang dalam Renstra BPS Kota Surabaya periode 2020-2024 adalah peningkatan kualitas data statistik. BPS sebagai lembaga yang bertugas menyediakan data dasar terus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sensus maupun survei yang dihasilkan. Untuk memenuhi kebutuhan statistik dasar, beberapa survei dan pendataan telah dilaksanakan pada tahun 2020, diantaranya Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Statistik tanaman Pangan, statistik Industri, Survei Harga, Survei Industri Besar/Sedang, Survei Konstruksi, Survei Bidang Jasa Pariwisata, Survei Penilaian Integritas, Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi, dan survei-survei lainnya. Jadwal penerbitan publikasi dari keseluruhan survei tersebut terangkum dalam Advance Release Calender (ARC) 2020 yang tersaji pada website BPS Kota Surabaya.

Selain meningkatkan kualitas data, BPS Kota Surabaya juga terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatannya. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan seperti pencanangan usulan predikat satker dengan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), pengembangan beberapa inovasi dan perbaikan proses penyelenggaraan SAKIP.

Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, BPS Kota Surabaya menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai untuk mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dan target-target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020.

Laporan Kinerja BPS Kota Surabaya 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kota Surabaya sebagai penyelenggara negara. Hal ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja BPS sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Di dalam laporan kinerja BPS 2020 tertuang hasil capaian kinerja BPS sepanjang tahun 2020. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Badan Pusat Statistik Kota Surabaya Tahun 2020, adalah perwujudan kewajiban Badan Pusat Statistik Kota Surabaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan Pusat Statistik di tahun yang akan datang. BPS Kota Surabaya menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) secara periodik sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan visi dan misi Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPS Kota Surabaya tahun 2020 ini adalah:

- a. Untuk memenuhi/menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Sebagai laporan kinerja tahunan yang merupakan pertanggung jawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya digunakan untuk pengambilan keputusan, dan penetapan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
- d. Sebagai tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.
- e. Mengevaluasi capaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2020.

1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Surabaya

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa BPS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. Kedudukan BPS Kota Surabaya sebagai perwakilan BPS di daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS diatur dalam keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah BPS Kota Surabaya merupakan perwakilan BPS di daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS Propinsi.

1) Kedudukan

Berdasarkan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, BPS Kota Surabaya merupakan perwakilan BPS di daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Propinsi Jawa Timur.

2) Tugas

Tugas BPS Kota Surabaya adalah melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, Bab III pasal 36 disebutkan bahwa:

- a. BPS Kota Surabaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, melalui kegiatan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain serta mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan publikasi baik secara rutin maupun insidental.
- b. BPS Kota Surabaya juga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, BPS Kota Surabaya melakukan kegiatan penyelenggaraan statistik, terutama yang berkaitan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat guna mengoptimalkan kontribusi responden dan apresiasi masyarakat terhadap statistik yang mendukung pembangunan wilayah Kota Surabaya.
- d. BPS Kota Surabaya ikut serta dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara mengikuti penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik melalui berbagai kegiatan, baik yang berkaitan langsung dengan statistik yang merupakan program BPS Pusat ataupun kegiatan lain yang bersifat umum yang merupakan program daerah.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Surabaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan Statistik Dasar di Tingkat Kota Surabaya.
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Surabaya
- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan Statistik di Kota Surabaya.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kota Surabaya.

4) Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi BPS, yaitu: BPS Kota Surabaya sebagai perwakilan BPS di tingkat Kota berkedudukan di Jl. A. Yani No. 152E Surabaya. Kepala BPS Kota Surabaya mempunyai tugas memimpin BPS Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kota Surabaya serta membina aparatur BPS Kota Surabaya agar berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan struktur organisasi yang ada, BPS Kota Surabaya di pimpin oleh seorang Kepala setingkat Eselon IIIa dengan membawahi 5 Kepala Seksi dan 1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha (setingkat eselon IVa). Dimana masing-masing Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha mempunyai beberapa staf (staf Fungsional maupun Staf Non Fungsional), sedangkan KSK (Koordinator Statistik Kecamatan) dibawah Kepala BPS Kota Surabaya. Jika dirinci struktur organisasi BPS Kota Surabaya yaitu:

- a. Kepala
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Statistik Sosial
- d. Seksi Statistik Produksi
- e. Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis)
- f. Seksi Integrasi Pengolahan dan Desiminasi Statistik (IPDS)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

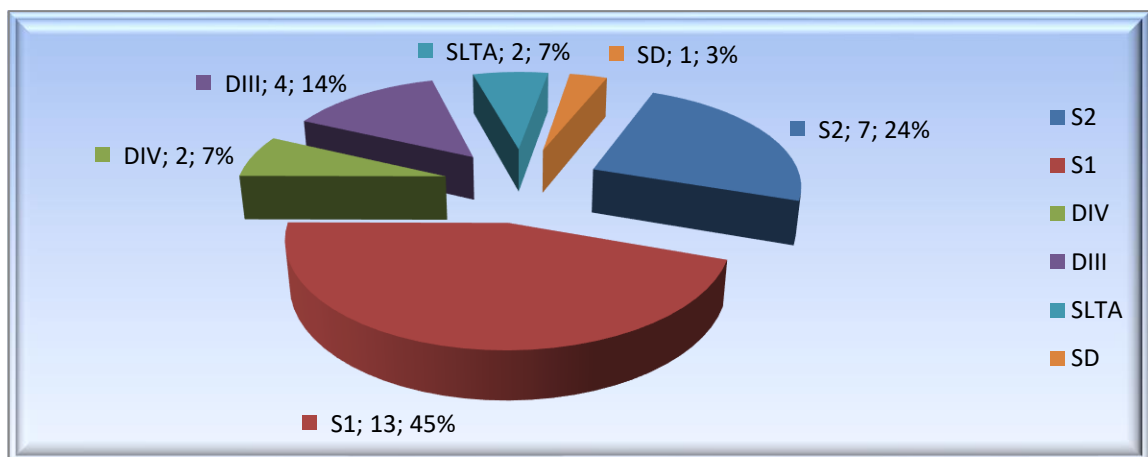
Secara rinci struktur organisasi BPS Kota terdapat pada *Lampiran 1*.

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kota Surabaya

Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas perlu didukung dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan professional untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan tugasnya dalam menyediakan data sebagai indikator baik dalam hal perencanaan maupun evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. BPS Kota Surabaya senantiasa memperhatikan komposisi SDM sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam rangka menyediakan SDM yang berkualitas dan profesional, BPS Kota Surabaya melaksanakan kegiatan diantaranya mengikutsertakan pegawai Negeri Sipil sebagai peserta diklat penjenjangan, diklat teknis maupun diklat fungsional, yang diadakan oleh BPS RI maupun BPS Kota Surabaya sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan pegawai BPS Kota Surabaya juga melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan Aparatur Sipil Negara terutama dalam tugasnya sehari-hari.

Kualitas SDM BPS Kota Surabaya relatif cukup baik yang tercermin dari tingkat Pendidikan, Saat ini dari 45 Pegawai BPS Kota Surabaya sebanyak 4 berpendidikan S2, 13 berpendidikan S1/D4, 3 orang pegawai berpendidikan D3 dan 3 berpendidikan SLTA. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk menghasilkan tenaga profesional statistik, BPS Kota Surabaya selain memberikan ijin belajar kepada pegawai. Dua pegawai yang berpendidikan Sarjana (S1) pensiun pada tahun 2020, karena sudah waktunya memasuki masa Purna Bhakti serta ada Empat orang pegawai mutasi ke BPS Kota Surabaya karena memang di tugaskan dan Alasan Keluarga, dalam tahun yang sama seorang pegawai mengajukan Tugas Belajar ke tingkat Pasca Sarjana (S2) dan lolos untuk meneruskan kegiatan Belajarnya ke Universitas Brawijaya Surabaya, tentunya lebih meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM tersebut menjadi potensi yang dimiliki oleh BPS Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas data. Semakin tingginya tingkat pendidikan pegawai, diharapkan berdampak signifikan kepada meningkatnya kualitas data yang dihasilkan.



Gambar 1. Komposisi SDM BPS Kota Surabaya Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1. Komposisi SDM BPS Kota Surabaya Menurut Jenis Jabatan

No	Unit Organisasi	Jenis				Jumlah
		Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Staf	
1	Kepala	1	-	-	-	1
2	Sub.Bagian Tata Usaha	-	1	-	4	5
3	Seksi Statistik Sosial	-	1	1	2	4
4	Seksi Statistik Produksi	-	1		4	5
5	Seksi Statistik Distribusi	-	1	3	-	4
6	Seksi	-	1	1	2	4
7	Seksi	-	1	1	1	3
8	KSK	-	-	14	5	19
JUMLAH		1	6	20	18	45

Tabel 2. Komposisi SDM BPS Kota Surabaya Menurut tingkat pendidikan

Jabatan/Pendidikan	S2	S1	DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
Kepala BPS		1						1
Sub.Bagian Tata Usaha	1	2		1	1			5
Seksi Statistik Sosial	2	2						4
Seksi Statistik Produksi	1	3			1			5
Seksi Statistik Distribusi	1	2	1					4
Seksi Nerwilis	1	1	2					4
Seksi IPDS	1	1	1					3
KSK	5	4		5	5			19
PPNPN					5			5
Total	12	16	4	6	12			50

1.5. Potensi dan Permasalahan

1.5.1 Potensi

Secara kelembagaan, BPS Kota Surabaya telah ditegaskan sebagai instansi vertikal melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. BPS Kota Surabaya merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia dan BPS Kota Surabaya secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS Sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung

jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Potensi-potensi yang dimiliki oleh BPS Kota Surabaya dimaksimalkan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Beberapa potensi yang dimiliki oleh BPS Kota Surabaya:

- 1) Saat ini dari 45 Pegawai BPS Kota Surabaya sebanyak 12 berpendidikan S2, 20 berpendidikan S1/D4, dan 6 orang pegawai berpendidikan D3 dan 17 berpendidikan SLTA.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk menghasilkan tenaga profesional statistik, BPS Kota Surabaya selain memberikan izin belajar kepada pegawai. Pada tahun 2020 ada 3 pegawai yang berpendidikan S1 yang mendapat izin belajar menempuh Pendidikan S2 dan 5 pegawai berpendidikan D3 mendapat izin belajar menempuh Pendidikan S1, selain izin belajar 1 pegawai yang berpendidikan S1 dapat beasiswa Pusdiklatren untuk mendapatkan Pendidikan S2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM tersebut menjadi potensi yang dimiliki oleh BPS Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas data. Semakin tingginya tingkat pendidikan pegawai, diharapkan berdampak signifikan kepada meningkatnya kualitas data yang dihasilkan.

Peningkatan kemampuan pegawai tidak hanya dilakukan dengan peningkatan jenjang pendidikan, tetapi juga meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi lainnya melalui pelatihan/*workshop*.

- 2) Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat sangat potensial untuk menunjang kegiatan BPS Kota Surabaya. Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kota Surabaya merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan data dan informasi statistik. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi tersebut, BPS

Kota Surabaya selain mendapatkan *hardware* dan *software* dari BPS Pusat juga mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan TIK dengan membuat rencana pengadaan barang teknologi informasi. Rencana tersebut diusulkan ke BPS Pusat (*bottom up process*). Semua proses pendataan dan output hasil kerja dalam bentuk publikasi sudah di-*upload* didalam media sosial yaitu FB (*Facebook*), *Tweeter* dan IG (*Instagram*).

- 3) Selain kelengkapan sarana TIK, BPS Kota Surabaya telah menyiapkan dan menata sedemikian rupa lingkungan kerja (*work environment*) seperti yang sangat kondusif berupa sarana dan prasarana kerja: bangunan gedung kantor yang memadai bagi seluruh pegawai untuk bekerja. Lingkungan kerja yang memadai dan nyaman dapat berdampak pada meningkatnya etos kerja pegawai. Setiap tahun melakukan pemeliharaan Gedung dan pada tahun 2019 membenahi ruang kepala BPS Kota Surabaya dan pada tahun 2020 memperbaiki kamar mandi luar yang digunakan selain pegawai juga dimanfaatkan oleh mitra dan tamu pencari data di BPS Kota Surabaya.
- 4) Pengembangan potensi tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga secara eksternal. Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan Pemerintah Pusat maupun Daerah sebagai rujukan untuk perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil. Dalam melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pemerintah terkait di wilayah kota Surabaya, BPS Kota Surabaya berperan aktif dalam menyediakan data yang dibutuhkan oleh dinas/instansi pemerintah lainnya tersebut. Peran tersebut ditunjukkan dengan diterimanya tawaran kerjasama penyediaan indikator-indikator tertentu yang dibutuhkan.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, BPS Kota Surabaya membuka kesempatan bagi para pegawainya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik dengan mengikuti tugas belajar maupun melalui ijin belajar sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Disamping itu juga, BPS Kota Surabaya membuka kesempatan bagi para pegawainya untuk menjadi pejabat fungsional baik sebagai pejabat fungsional statistisi maupun

pejabat fungsional pranata computer termasuk pada tahun 2020 banyak pegawai BPS Kota Surabaya yang telah dilantik menjadi Pejabat fungsional statistisi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat sangat potensial untuk menunjang kegiatan BPS. Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan data dan informasi statistik.

Pengembangan juga dilakukan bagi potensi eksternal. Dewasa ini data dan informasi statistik secara resmi digunakan pemerintah sebagai rujukan untuk perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil.

Sejalan dengan kondisi tersebut, secara nasional kepedulian masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Kota Surabaya semakin meningkat, dan menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu BPS Kota Surabaya selalu berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mensukseskan pembangunan di segala bidang dengan menyediakan data dan informasi statistik.

1.5.2. Permasalahan

Pada tahun 2020 pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Surabaya telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kendala yang dihadapi. BPS Kota Surabaya telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2020-2024, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Kota Surabaya harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS Kota Surabaya dari sudut pandang responden sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju terus meningkat.

Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat

tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data yang sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas data statistik, peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, serta peningkatan birokrasi yang akuntabel lebih bertumpu pada permasalahan internal permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan internal yang menonjol adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) statistik yang profesional dan kompeten sesuai dengan seksi tugas, terutama untuk tenaga KSK dan staf termasuk dalam hal administrasi. Hal ini sebagai dampak dari tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data sampai pada level wilayah terkecil. Selain itu, sarana dan prasarana TIK yang dimiliki BPS belum seluruhnya sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Termasuk sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui.

Permasalahan eksternal yang menonjol adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan kualitas data dan *response rate* yang rendah. *Respondent-burden* atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Permasalahan eksternal lain adalah belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Hal ini muncul sebagai akibat dari diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Untuk memenuhi

kebutuhan yang demikian, BPS terkendala dengan Undang-undang Nomer 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu ada pula anggapan masyarakat bahwa BPS adalah sumber dari segala sumber informasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS, karena tidak diperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Koordinasi antar instansi masih belum optimal sehingga terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien, masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih baik dan terarah dalam rangka peningkatan kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*) maupun pengguna data (*user engagement*). Selain itu juga belum optimalnya produk-produk statistik kepada *stakeholders* dan masyarakat. Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad-hoc* yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad-hoc* yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten.

Secara teknis, kebijakan *one data* yang dirumuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo juga memberikan tantangan baru bagi BPS termasuk BPS Kota Surabaya. Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan oleh BPS Kota Surabaya di tengah terbatasnya penambahan jumlah SDM. Dari sisi pengolahan, kebijakan pengolahan data yang dikembangkan secara *stand alone* (berdiri sendiri) oleh beberapa *subject matter* menyebabkan

sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS telah teridentifikasi. Permasalahan yang ada antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (vacant) pada struktur organisasi.

Permasalahan penting lainnya yang dihadapi BPS Kota Surabaya dalam mencapai sasaran berdasarkan analisis pencapaian kinerja tahun 2020 antara lain:

- a. Semakin banyaknya pengunjung website BPS Kota Surabaya, menuntut pengelolaan *website* secara lebih profesional. Pelayanan Statistik Terpadu yang merupakan *quick win* BPS memerlukan perhatian lebih dan pegawai khusus dengan keahlian tertentu, sehingga dapat memberikan kepuasan pelayanan terhadap pengunjung.
- b. Pada proses pengolahan data selalu ada revisi (PATH) program, kadangkala data yang sudah dilakukan pengentrian ke komputer tidak bisa dibaca dengan menggunakan versi terbaru.
- c. Keterbatasan jumlah pegawai, sementara bertambah padatnya kegiatan BPS Kota Surabaya menjadikan hal tersebut menjadi kendala, meskipun hal ini bisa diatasi dengan menggunakan Mitra Petugas, tetapi tidak semua kegiatan memakai mitra petugas.
- d. Kegiatan Industri Besar yang tahunan masih ada yang non respon, sehingga mempengaruhi target pencapaian. Termasuk kegiatan survei tanaman pangan/ubinan beberapa diantaranya lewat ubinan dikarenakan informasi panen dari petani tidak disampaikan dengan akurat.

Ada pegawai yang memangku jabatan fungsional ahli, dimana pengajuan penilaian angka kredit amat berat dan menuntut untuk bisa menyusun kertas kerja dan membuat publikasi dalam rangka memenuhi angka kredit, keterbatasan waktu disebabkan karena masih melakukan kegiatan lapangan baik pendataan maupun pengawasan sehingga pengajuan penilaian angka kredit bagi pegawai tersebut tidak tercapai.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja BPS Kota Surabaya tahun 2020 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. **Pendahuluan**, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Kota Surabaya; sumber daya manusia di BPS Kota Surabaya, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Kota Surabaya; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. **Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2020.
- Bab III. **Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS 2020; Perkembangan Capaian Kinerja BPS; Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2020-2024; Capaian Kinerja BPS terhadap Target RPJMN 2020-2024; Prestasi tahun 2020; Kegiatan Prioritas BPS 2020; Upaya Efisiensi BPS 2020 dan Realisasi Anggaran tahun 2020.
- Bab IV. **Penutup**, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Surabaya 2020-2024

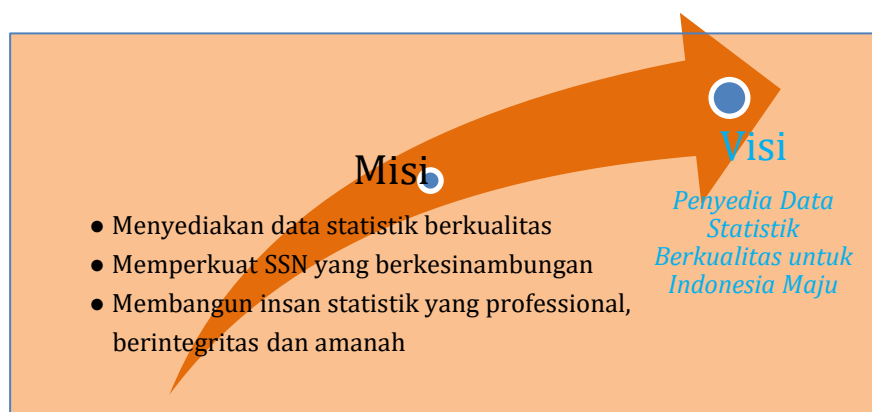
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, dengan Visi: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Sejalan dengan visi tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung RPJMN periode ketiga dan pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025.

BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan *good governance*.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di seksi informasi

(termasuk informasi statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Kota Surabaya perlu menyusun suatu perencanaan Strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya *good governance* dan *clean government* tersebut.

Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Kota yang berlaku selama kurun waktu 2020-2024. Dengan adanya renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Kota Surabaya akan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien.



Gambar 2. Visi dan Misi BPS Kota Surabaya 2020-2024

a) Visi

Visi dari BPS Kota Surabaya adalah **"Penyelenggara Statistik Dasar Untuk Menyediakan Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju"**

Dengan visi BPS 2020-2024, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai Pembina data statistik.

b) Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi BPS Kota Surabaya yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik;
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Tabel 3. Pernyataan Visi dan Misi BPS 2020-2024

MISI BPS KOTA SURABAYA 2020 -2024	
VISI BPS KOTA SURABAYA 2020-2024 <i>Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju</i>	1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
	2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
	3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
	4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

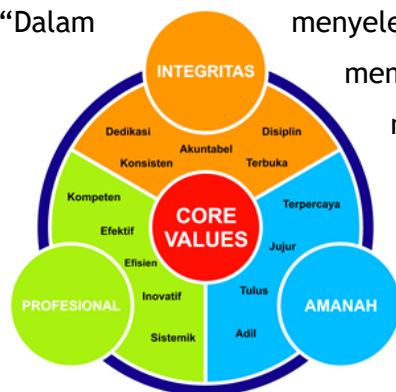
Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Adapun pernyataan Misi BPS Kota Surabaya tahun 2020-2024 yang dikaitkan dengan Visi BPS Kota Surabaya tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Statistik Dasar di Provinsi dalam rangka menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan fungsional, mendorong kelancaran dan pembinaan kegiatan statistik instansi pemerintah dalam rangka membina Dinas/Instansi melalui SSN yang berkesinambungan;
- c. Mengembangkan Inovasi layanan publik dengan konsep layanan prima untuk terwujudnya SSN;
- d. Menyelenggarakan pembinaan SDM dan pelayanan administrasi umum untuk mewujudkan SDM unggul dan adaptif berdasarkan nilai-nilai Profesional, Integritas dan Amanah.

Membangun insan statistik ...

... *profesionalisme* ...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.



... *integritas* ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satu

Gambar 3. Nilai Inti BPS Kota Surabaya

kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...*amanah*...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

c) Tujuan

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi organisasi.

Undang-undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/kementerian, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas, perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS Kota Surabaya untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan berikut ini.

Tabel 4. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Surabaya 2020-2024

MISI BPS KOTA SURABAYA 2020 -2024	
VISI BPS KOTA SURABAYA 2020 -024 TUJUAN	“Penyelenggara Statistik Dasar Untuk Menyediakan Data Berkualitas Menuju Indonesia Maju”
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Statistik Dasar di Provinsi dalam rangka menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional 2. Mengkoordinasikan kegiatan fungsional, mendorong kelancaran dan pembinaan kegiatan statistik instansi pemerintah dalam rangka membina Dinas/Instansi melalui SSN yang berkesinambungan. 3. Mengembangkan Inovasi layanan publik dengan konsep layanan prima untuk terwujudnya SSN 4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 	
VISI BPS KOTA SURABAYA 2020 - 2024	“Penyelenggara Statistik Dasar Untuk Menyediakan Data Berkualitas Menuju Indonesia Maju”
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menyelenggarakan Statistik Dasar di Provinsi dalam rangka menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. 6. Mengkoordinasikan kegiatan fungsional, mendo-rong kelancaran dan pembinaan kegiatan statistik instansi pemerintah dalam rangka membina Dinas/Instansi melalui SSN yang berkesi-nambungan. 7. Mengembangkan Inovasi layanan publik dengan konsep layanan prima untuk terwujudnya SSN

Rumusan tujuan BPS Kota Surabaya dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Tahun 2020-2024 adalah:

1. **Tujuan 1:** Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:

Misi ke-1: Menyelenggarakan Statistik Dasar di Provinsi dalam rangka menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;

2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:

Misi ke-2 : Mengkoordinasikan kegiatan fungsional, mendorong kelancaran dan pembinaan kegiatan statistik instansi pemerintah dalam rangka membina Dinas/Instansi melalui SSN yang berkesinambungan;

3. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:

Misi ke-3 : Mengembangkan Inovasi layanan publik dengan konsep layanan prima untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan

4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan:

Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (*Statistical Capacity Building - Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Di dalam tujuan kedua ini, peran BPS sebagai pembina data dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin terlihat.

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan

kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap-Cerdas yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik.

Tujuan keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu pengembangan sumber daya manusia.

d) Kebijakan BPS Kota Surabaya

Arah kebijakan penyelenggaraan kegiatan BPS Kota Surabaya mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi BPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat;
- 3) Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS;
- 4) Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
- 5) Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN;
- 6) Penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait kegiatan statistik;

Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja.

e) Sasaran BPS Kota Surabaya

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal).

Renstra BPS Kota Surabaya tahun 2020-2024 disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*, yang artinya seluruh Program K/L harus mengikuti arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar K/L dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS Kota Surabaya ini termasuk restrukturisasi program sesuai dengan arahan Presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan *outcome* dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga, maupun antar Kementerian/Lembaga (Lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam TM restrukturisasi program BPS yang terdiri dari: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen (DMPTTL).

Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Strategis Teknis BPS

T U J U A N	SASARAN STRATEGIS TEKNIS
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2. Penguatan Komitmen Dinas/Instansi terhadap SSN
T3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Penguatan Statistik Sektoral Dinas/Instansi
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4. SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” adalah:
 - 1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan indikator sasaran:
 - 1.1.1. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, dan evaluasi pembangunan nasional.
 - 1.1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN” adalah:
 - 2.1. Penguatan Komitmen Dinas/Instansi terhadap SSN, dengan indikator sasaran:
 - 2.1.1. Persentase Dinas/Instansi yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.
 - 2.1.2. Persentase Dinas/Instansi penyusunan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.
3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: “Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” adalah:
 - 3.1. Penguatan Statistik Sektoral Dinas/Instansi, dengan indikator sasaran:
 - 3.1.1. Persentase Dinas/Instansi yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.
4. Sasaran strategis dari tujuan keempat: “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” adalah:
 - 4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan indikator sasaran:
 - 4.1.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat.
 - 4.2.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

f) Program yang dilaksanakan oleh BPS Kota Surabaya

Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS Kota Surabaya, maka untuk tahun 2020 dilaksanakan tiga (3) program, yaitu:

(i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DMPTTL)

Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan Tugas Teknis lainnya yang baik di bidang penyediaan data statistik. Dasar kebijakan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti:

- a. Pelayanan perkantoran dan Kepegawaian meliputi pembayaran gaji dan tunjangan;
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran seperti pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; penambah daya tahan tubuh; penanggung Jawab Pengelola keuangan, langganan daya dan jasa; Pengiriman surat dinas.
- c. Administrasi Perkantoran dan Keuangan

Lancarnya kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas secara lebih efektif, efisien dan optimal dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas dan sesuai dengan jadwal waktu dan target substansi yang diharapkan. Pada akhirnya dengan meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas diharapkan akan berdampak pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna data statistik.

Sasaran program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya Pengelolaan Gaji dan Tunjangan;
- b. Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- c. Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
- d. Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja dan Terlaksannya Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi; dan
- e. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Kerja.

(ii) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini dimaksudkan untuk Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan pengolahan data, serta pengkajian dan analisis statistik secara terus menerus guna menjamin ketersinambungan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di bidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan melalui

berbagai sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi semua bidang pembangunan, serta untuk penentuan kebijaksanaan, baik nasional maupun regional. Untuk mendukung program Penyediaan dan Pelayanan Informasi statistik tersebut, pada tahun anggaran 2019 BPS Kota Surabaya telah menyusun program kegiatan yang umumnya masih merupakan kegiatan lanjutan dari program-program yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Program PPIS bertujuan untuk:

1. Menyediakan secara berkelanjutan statistik dasar yang berkualitas di bidang kesejahteraan rakyat, demografi, ekonomi dan moneter dan bidang lain baik yang bersifat sektoral maupun lintas-sektor seperti kependudukan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan lainnya melalui berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi catatan administrasi;
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknis dan manajemen statistik, komputasi data serta administrasi;
3. Mengembangkan sistem informasi statistik secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan nasional dan internasional di bidang teknologi dan informasi yang dibutuhkan pemerintah maupun masyarakat;
4. Mengembangkan metode penyelenggaraan statistik sesuai dengan ragam statistik yang diperlukan;
5. Menyediakan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan
6. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah di bidang statistik dalam hal penyeragaman konsep, definisi, perumusan indikator, serta hal-hal lainnya guna terciptanya sistem statistik nasional.

Arah kebijakan program Penyediaan dan Pelayanan Informasi statistik adalah untuk:

1. Menjamin kesinambungan penyediaan dan Pelayanan informasi statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di bidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan melalui berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi produk administrasi untuk mendukung semua bidang pembangunan, baik nasional maupun regional; dan

2. Mengembangkan sistem informasi statistik, sistem informasi geografis, diseminasi informasi statistik, dan sistem informasi manajemen guna mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan data statistik bagi pemerintah maupun masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri.

2.2 Perjanjian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2021

Renstra BPS Kota Surabaya Tahun 2020-2025 menjadi acuan bagi seluruh jajaran dilingkungan BPS Kota Surabaya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kerja tahunan (RKT), sedangkan target kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil selama periode tahun 2020 telah disampaikan Penetapan Kinerja BPS Kota Surabaya yang merupakan ikhtisar rencana kerja disusun menurut satuan kerja eselon IV dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Statistik Sosial, Seksi Statistik Produksi, Seksi Statistik Distribusi, Seksi Nerwilis dan Seksi IPDS apabila dirangkum dan disesuaikan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya terdapat dalam tabel dibawah ini. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 terhadap target atau merupakan ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas lembaga pemerintahan.

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS kepada Presiden atas penggunaan anggaran BPS. Keberhasilan pencapaian target sangat didukung oleh penganggaran di BPS.

Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMPTTL); (2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi (PSPA). Target yang

dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target. Penetapan target tersebut dilakukan pada awal tahun dimana ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama tahun 2020. Adapun target perjanjian Kinerja Kota Surabaya 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Fokus BPS Kota Surabaya sebagai perwakilan BPS RI di daerah adalah menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, dengan kata lain kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator kinerja semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data dan informasi yang berkualitas, demi mendukung visi BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju.

Sebagai penyedia data dan informasi maka fokus BPS Kota Surabaya adalah menyediakan data yang berkualitas. Dengan kata lain, kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator kinerja, semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data berkualitas.

Tabel. 4
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA TAHUN 2020

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	50
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	4,87
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	100
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Persentase K/L/D/I penyusunan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	50
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
4.1. SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	64
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	100

Selain dimensi kualitas, BPS Kota Surabaya yang merupakan lembaga penyelenggara perstatistikan khususnya statistik dasar yang dibutuhkan pemerintah, harus mengacu pula pada Prinsip Dasar Statistik Resmi yang telah disepakati secara internasional. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Statistik Hanya Memberikan Keterangan Lengkap Secukupnya Saja

Statistik resmi menyediakan unsur yang mutlak diperlukan dalam sistem informasi suatu masyarakat demokratis, serta melayani pemerintah, perekonomian dan umum dengan data mengenai keadaan ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan. Pada akhirnya statistik resmi yang ternyata memiliki manfaat praktis harus dirangkum dan disediakan untuk umum oleh lembaga perstatistikan tanpa pilih kasih, untuk menghormati hak Warga Negara untuk mendapatkan informasi tentang statistik.

2. Statistik Hanya Menyediakan Informasi yang Terpercaya Saja

Untuk memperoleh kepercayaan dalam statistik-resmi, lembaga perstatistikan perlu menentukan atas dasar pertimbangan profesional, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika, tentang metode dan prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data statistik.

3. Statistik Harus Dapat Dipahami Dengan Mudah Oleh Pengguna

Agar data yang dikumpulkan dalam kegiatan perstatistikan dapat ditafsirkan oleh pengguna dengan benar, lembaga perstatistikan harus menyediakan informasi terkait standar ilmiah mengenai sumber data, metode dan prosedur yang digunakan.

4. Statistik Hanya Menyediakan Keterangan Yang Benar Saja

Lembaga perstatistikan berhak menunjukkan terjadinya salah tafsir tentang statistik-resmi serta penyalahgunaan statistik.

5. Statistik Ganda-Sumber, Ganda-Manfaat, dan Ganda-Pakai

Data untuk keperluan kegiatan perstatistikan dapat dipetik dari berbagai jenis sumber, bisa berasal dari survei atau catatan administrasi. Lembaga perstatistikan bertugas memilih sumber itu dengan mempertimbangkan mutu, kemuktahiran, biaya serta beban yang ditanggung oleh responden survei.

6. Kerahasiaan Data Individu

Data individu yang dikumpulkan oleh lembaga perstatistikan untuk kompilasi statistik, baik merupakan perseorangan atau badan legal, harus diperlakukan secara rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan perstatistikan.

7. Transparansi Tatacara Perstatistikan

Undang-undang, peraturan dan proses pengolahan atau penghitungan sesuai sistem statistik yang digunakan harus diumumkan.

8. Koordinasi Antar Lembaga Pengumpul Informasi

Koordinasi antara berbagai badan dan lembaga yang mengumpulkan statistik di dalam suatu negara adalah persyaratan mutlak agar diperoleh konsistensi (ketaatan) dan efisiensi dalam sistem perstatistikan.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan BPS Kota Surabaya. Akuntabilitas kinerja BPS Kota Surabaya merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab II.

Untuk mengetahui akuntabilitas serta keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi/organisasi perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolok ukur penilaian kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kota Surabaya Tahun 2020 merupakan perwujudan kewajiban BPS Kota Surabaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan BPS Kota Surabaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama satu tahun anggaran 2020, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik mempunyai 4 (empat) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 seperti pada Tabel 4.

3.1. Capaian Kinerja BPS Kota Surabaya 2020

3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Capaian kinerja BPS Kota Surabaya tahun 2020 dijabarkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis. Masing-masing capaian tersebut diuraikan sebagai berikut.

Ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai BPS Kota Surabaya pada tahun 2020, yaitu:

1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Rincian capaian kinerja tujuan BPS Kota Surabaya seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2020

Indikator Kinerja Tujuan	Target 2020 (%)	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
		(persen)	(persen)
Tujuan 1:			
Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	50	85,71	130
Tujuan 2:			
Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan SSN	50	50	100
Tujuan 3:			
Meningkatnya Pelayanan prima Dalam Penyelenggaraan SSN	15	13,8	92
Tujuan 4:			
Penguatan Tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	64	49,61	77,51
Rata - rata			99,88

Tujuan-1: Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Keinginan pemerintah dan masyarakat terhadap data berkualitas, mendorong BPS Kota Surabaya harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya. BPS Kota Surabaya mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Kualitas data sangat dipengaruhi kelengkapan data dan jumlah sampel yang mewakili, hal ini pengaruh langsung dari persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS merupakan indikator dari kualitas data yang dihasilkan. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas diukur dengan Persentase konsumen yang merasa puas terhadap data yang dihasilkan oleh BPS Kota Surabaya.

Pencapaian tujuan 1 ini diperoleh memakai indikator persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS. Dalam menghasilkan dan menyajikan data statistik BPS senantiasa berusaha untuk memperhatikan kepuasan konsumen terhadap produk data yang dihasilkan. Pengukuran persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS menggunakan data hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) yang dilakukan oleh Seksi IPDS BPS Kota Surabaya. Indikator ini diperoleh dari survey kebutuhan data (SKD) yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap data yang dihasilkan oleh BPS Kota Surabaya.

Tujuan pertama yaitu “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” diukur dengan rata-rata indikator “Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional dan Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional”. Indikator ini mencerminkan penilaian pengguna data yang menggunakan data statistik (BPS) yang dihasilkan yang meliputi 5 (lima) ragam data, yaitu: Data Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik, serta Metodologi Statistik sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional, serta produk publikasi statistik yang sudah menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

Berdasarkan Tabel 5 diatas target tujuan peningkatan kualitas data statistik adalah 50,00 persen dan realisasi capaian menunjukkan bahwa 85,71 persen konsumen merasa puas dengan kualitas data BPS. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 171,42 persen sesuai kesepakatan rapat tim Sakip sebelum menyusun Laporan kinerja capaian kinerja untuk laporan maksimal 130 persen sehingga capaian kinerja tujuan peningkatan kualitas data statistik adalah menjadi sebesar 130,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan peningkatan data statistik untuk memenuhi dasar pembangunan sudah memenuhi kebutuhan konsumen dengan sangat baik.

Secara umum, BPS Kota Surabaya telah melakukan beberapa hal untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan peran Tim Pelaksana khususnya Pilar Penataan Tata Laksana. Tim ini bertugas untuk memastikan apakah proses pengumpulan data yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau buku pedoman yang digunakan sebagai panduan dalam pengumpulan data dari survei bersangkutan.

Peningkatan kualitas data juga dilakukan dengan lebih mengaktifkan peran para pengawas dan memastikan bahwa peran yang harus diambil terlaksana dengan baik. Selama ini diduga bahwa peran para pengawas belum berjalan maksimal yang diindikasikan dengan masih banyaknya perbaikan yang dilakukan pada tahap editing coding dan pengolahan dokumen pencacahan. Seharusnya pengawas memastikan apakah data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum data diserahkan kepada unit pengolahan.

Kepada para petugas, sebelum melakukan pendataan juga dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan, agar lebih mahir dalam menggali informasi dari responden. Petugas juga dituntut untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan responden sebagai sumber data melalui pendekatan kekeluargaan dalam melakukan wawancara. Selain itu berbekal pengetahuan dan pengalaman yang telah diajarkan, petugas senantiasa diingatkan bahwa dalam melakukan pendataan di lapangan, agar selalu memperhatikan konsistensi dan koherensi dari data yang dikumpulkan karena adanya keterkaitan antara data yang satu dengan data lainnya.

Untuk melengkapi kegiatan di atas, penanggungjawab kegiatan juga telah melakukan monitoring kualitas. Monitoring kualitas atau pengendalian kualitas dibuat pada saat kegiatan sedang berlangsung yang bertujuan untuk menjaga kualitas hasil

dari kegiatan yang sedang dilaksanakan serta untuk mengetahui sedini mungkin kesalahan yang terjadi baik dari sisi cakupan (*coverage*) maupun isi (*content*) data yang dikumpulkan. Hasil dari kegiatan ini selanjutnya tertuang dalam bentuk dokumen pengendalian proses kegiatan.

Tujuan-2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN

Tujuan kedua yaitu “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN diukur dengan indikator “Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar”. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

Berdasarkan Tabel 5 diatas, target tujuan Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah 50 persen, dan realisasinya mencapai 50 persen. Dengan demikian capaian kinerja tujuan Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah sebesar 100,00 persen atau tercapai dengan baik.

Sepanjang tahun 2020, BPS Kota Surabaya telah berupaya secara terus menerus meningkatkan kualitas layanannya. Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mendukung upaya tersebut di antaranya dengan menjalankan Pengembangan Standarisasi Pengelolaan Perpustakaan yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang disusun diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi para konsumen yang ingin mendapatkan pelayanan. Untuk meningkatkan penguatan penerapan SOP, BPS Kota Surabaya melakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

Secara garis besar tahapan pekerjaan BPS Kota Surabaya adalah mulai dari tahap pengumpulan, pengolahan, analisis, sampai dengan penyajian data dan informasi statistik. Data yang dihasilkan oleh BPS Kota Surabaya mencatat segala perubahan yang ada di masyarakat, baik sosial dan ekonomi setiap tahun. Semakin hari

jumlah pencari data dan informasi statistik semakin meningkat, Hal ini bisa dilihat jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website meningkat terus, hal ini terlihat pada tahun 2020 sebesar 114,1 persen pengunjung yang mengakses data BPS melalui Website. Selebihnya konsumen data yang berkunjung langsung ke BPS Kota Surabaya untuk mencari data baik lewat perpustakaan maupun ke *subject matter* yang ada di BPS Kota Surabaya. Untuk memenuhi itu BPS berupaya memberi layanan terbaik (pelayanan prima) kepada masyarakat melalui Diseminasi Statistik. Setiap penyelenggara pelayanan publik di badan pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Standar pelayanan ini menjadi tolok ukur penyelenggaraan pelayanan yang diselaraskan antara kemampuan sumber daya tersedia dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya standar pelayanan yang disusun bukan sekadar di atas kertas saja tetapi sebagai bentuk kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, BPS Kota Surabaya membangun sebuah sistem terintegrasi, yang memadukan beberapa jenis pelayanan statistik dalam layanan, yang bernama Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Selain untuk mengakomodir kebutuhan pengguna data, PST juga digunakan untuk pengelolaan administrasi pengunjung/tamu yang datang ke BPS dalam rangka mencari data dan atau informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian sistem ini disamping meningkatkan pelayanan sekaligus dapat membantu BPS Kota Surabaya secara tertib dan teratur mengelola kebutuhan pengunjung/tamu. Dengan adanya sistem ini diharapkan setiap kebutuhan para konsumen data bisa tercapai dan terpenuhi dengan lebih cepat, lebih mudah serta lebih efisien.

Meningkatkan Pelayanan Prima hasil kegiatan statistik sangat diharapkan masyarakat pengguna data, dimana pengguna data dapat dengan mudah mengakses data yang dihasilkan oleh BPS. Persentase Konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS Kota Surabaya diharapkan meningkat, konsumen yang paling banyak dari kalangan Mahasiswa karena Kota Surabaya sendiri merupakan **“Ibu Kota Provinsi dan Kota Pendidikan”** dengan banyaknya Universitas-universitas yang ada. Selain itu profesi akademi dan penelitian, Instansi Pemerintah, lembaga-lembaga publik, media masa, Pemda, perbankan dan swasta.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan BPS Kota Surabaya untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST). PST merupakan pelayanan yang bersifat *one gate services* dan *one stop services*. Di dalam PST terdapat unit pelayanan perpustakaan tercetak, perpustakaan digital, data mikro, konsultasi statistik, penjualan publikasi *softcopy/hardcopy* dan pelayanan rekomendasi/bantuan survei. Penjualan publikasi *softcopy/hardcopy* merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang mekanismenya telah diatur dalam PP Nomor 7 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.

Tujuan-3: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik

Tujuan ketiga BPS Kota Surabaya yaitu “Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui koordinasi dan dan pembinaan yang efektif di bidang statistik” yang diukur dengan indikator. Adapun layanan data yang disediakan oleh BPS terdiri atas:

1. Layanan konsultasi dan rekomendasi kegiatan statistik;
2. Layanan konsultasi pengguna data;
3. Layanan perpustakaan tercetak;
4. Layanan perpustakaan digital;
5. Layanan penjualan buku dan;
6. Layanan data mikro/peta digital/softcopy publikasi. Setiap permintaan data akan dilayani sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan **Tabel 5**, target dari tujuan ketiga ini telah ditetapkan sebanyak 13,8 persen dari OPD yang ada di wilayah Kota Surabaya sebanyak 29 OPD. Dari target tersebut, realisasinya tercapai 100 persen atau sebanyak 4 (tiga) O P D . Hal ini dapat dikatakan berhasil dalam melayani konsumen data, salah satunya adalah melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST). PST merupakan pelayanan yang bersifat *one gate services* dan *one stop services*. Di dalam PST terdapat unit pelayanan perpustakaan tercetak, perpustakaan digital, data mikro, konsultasi statistik,

penjualan publikasi softcopy/hardcopy dan pelayanan rekomendasi/bantuan survei. Penjualan publikasi softcopy/hardcopy merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang mekanismenya telah diatur dalam PP Nomor 7 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.

Tujuan-4 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel

Peningkatan Penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam era reformasi birokrasi. Indikator kinerja dari tujuan keempat adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Pada tahun 2020 penilaian SAKIP dari inspektorat sebesar 67,10 capaian kinerja sebesar 111,83 naik dibanding tahun lalu, dengan demikian capaian kinerja memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

Tujuan **keempat** yaitu “Peningkatan birokrasi yang akuntabel” yang diukur dengan indikator “hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat”. Penilaian SAKIP meliputi 5 (lima) komponen besar yang menjadi objek evaluasi dari Inspektorat BPS. Kelima komponen besar tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Masing-masing komponen mempunyai bobot penilaian yang beragam. Dari total bobot (100), komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot (30), komponen pengukuran kinerja mempunyai bobot (25), pelaporan kinerja mempunyai bobot (15), evaluasi kinerja mempunyai bobot (10) dan capaian kinerja mempunyai bobot (20).

Berdasarkan Tabel 5, target nilai SAKIP yang ditetapkan adalah sebesar 64 poin dengan realisasi sebesar 49,61 poin atau mencapai 77,51 persen. Hasil penilaian Sakip pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 62,92 disebabkan tidak terpenuhi semua dokumen LKE SAKIP. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat BPS RI, beberapa catatan yang diberikan untuk penilaian per komponen adalah sebagai berikut: Untuk komponen perencanaan kinerja BPS Kota Surabaya telah memiliki dokumendokumen perencanaan kinerja Perjanjian Kinerja (PK) serta IKU namun masih terdapat kelemahan yaitu Renstra BPS Kota Surabaya belum selaras dengan dokumen Renstra BPS.

Penilaian komponen Pengukuran Kinerja, BPS Kota Surabaya telah memanfaatkan teknologi informasi berupa program excel atau program rencana aksi yang dikirim oleh BPS Pusat. Pengukuran kinerja individu telah dilaksanakan namun belum dibuat per kelas jabatan. Komponen pelaporan kinerja, BPS Kota Surabaya telah menyusun sesuai dengan prototype laporan yang ditentukan oleh BPS Pusat.

Untuk pelaksanaan komponen Evaluasi Kinerja, BPS Kota Surabaya telah membentuk Tim SAKIP yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing bagian dan seksi yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala BPS Kota Surabaya. Tim ini secara rutin setiap triwulan melakukan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan dalam memenuhi target tersebut sekaligus mencari solusi untuk memecahkan kendala tersebut.

Pada komponen capaian kinerja, ditemukan bahwa pada tahun 2020 terdapat beberapa capaian kinerja yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Catatan yang diberikan oleh inspektorat adalah bahwa penentuan target kinerja hendaknya mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 BPS Kota Surabaya mendapat penghargaan dari eksternal (KPPN SURABAYA) sebagai satuan kerja terbaik IV Kategori B periode penilaian Semester II tahun 2020 dalam hal kinerja keuangan dengan 7 kriteria.

Dari capaian kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja tujuan BPS secara keseluruhan adalah sebesar 99,88 yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 103,5 persen, menurun dibandingkan tahun 2019 namun pada tahun 2020 hampir mencapai 100 persen.

3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran

Untuk mempermudah pencapaian tujuan, maka BPS telah merumuskan sasaran strategi untuk masing-masing tujuan. Hasil capaian kinerja sasaran strategis BPS Kota Surabaya selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8.
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tujuan Pertama BPS Kota Surabaya Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	50	85,71	130
	1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	4,87	4,87	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 1		115			

Berdasarkan Tabel 6, sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan”, yaitu “meningkatkan pemanfaatan data statistik yang berkualitas”.

BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertugas menghasilkan data yang digunakan dalam penyusunan perencanaan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya sehingga kepercayaan pengguna data terhadap kualitas data yang dihasilkan oleh BPS juga semakin meningkat.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS”, BPS Kota Surabaya telah menetapkan beberapa indikator kinerja utama (IKU) di antaranya:

Indikator pertama dari sasaran strategis pertama untuk tujuan pertama adalah persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Untuk mengukurnya, konsumen diminta menyatakan kepuasan terhadap kualitas data statistik (BPS) yang meliputi 5 (lima) ragam data, yaitu: Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik, serta Metodologi Statistik. Di setiap ragam data akan ditanyakan 9 (sembilan) pertanyaan meliputi Akurasi/ketepatan data; Kemutakhiran data; Relevansi data; Aksesibilitas data; Komparabilitas data; Koherensi data; Interpretabilitas data; Kelengkapan data; Aktualisasi dan Ketepatan Waktu. IKU ini diukur dengan formula:

$$= X/Y \times 100\%$$

Dimana:

X = Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Y = Jumlah konsumen yang menggunakan data statistik

Adapun unit kerja yang menjadi penanggungjawab dari indikator di atas adalah seksi-seksi teknis yaitu Seksi Statistik Distribusi, Seksi Statistik Sosial, Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, dan Seksi Statistik Produksi. Sumber data untuk indikator ini berasal dari Survei Kebutuhan Data dan Survei Kepuasan Konsumen.

Pada tahun 2020 indikator ini ditargetkan sebesar 50,00 persen, dan realisasinya mencapai 85,71 persen. Dengan demikian tingkat capaian kinerjanya adalah 130 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh BPS Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas data yang dihasilkan berjalan dengan sangat baik.

Indikator kedua dari sasaran strategis pertama untuk tujuan pertama adalah persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

Formulanya adalah: $= X/Y \times 100\%$

Dimana:

X = Jumlah konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional

Y = Jumlah konsumen

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Seksi Statistik Distribusi, Seksi Statistik Sosial, Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, dan Seksi Statistik Produksi dan sumber datanya berasal dari Survei Kepuasan Konsumen.

Pada tahun 2020 indikator ini ditargetkan sebesar 100 persen dan realisasi yang dicapai sebesar 100,00 persen, sehingga secara persentase, capaian kinerjanya menjadi 100,00 persen.

Masalah/kendala yang dihadapi

Secara umum, rata-rata capaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas berada di atas 100,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian telah sesuai bahkan di atas target yang ditetapkan. Namun demikian tentunya masih banyak kendala yang dihadapi maupun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk dapat meningkatkan capaiannya di masa depan

Beberapa kendala yang dihadapi oleh BPS Kota Surabaya di antaranya:

1. Perencanaan kegiatan yang kurang terpadu sehingga menjadi kendala saat pelaksanaan kegiatan pada unit wilayah terbawah atau pada tingkat pelaksana lapangan.
2. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam waktu bersamaan menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan maksimal dan tidak sesuai rencana yang telah disusun. Kondisi tersebut menuntut penggunaan tenaga non organik (mitra statistik), namun ketersediaan mitra statistik yang kompeten di kabupaten/kota jumlahnya terbatas.
3. Keterbatasan jumlah sampel yang tersedia terutama untuk mendukung indikator-indikator yang bersifat makro ekonomi. Isian dokumen survey dari pencacah masih terdapat kesalahan seperti data kurang lengkap dan tidak wajar ataupun timpang, sehingga oleh pengawas masih harus dimintakan perbaikan oleh pencacah. Belum lagi dari hasil pengolahan yang mungkin masih perlu diperbaiki lagi. Efek keterlambatan pada satu tahapan akan berimbas pada penyajian data.

4. Kurangnya catatan neraca perusahaan terutama untuk usaha yang berkategori IMK, sehingga petugas menemukan kendala dalam menggali informasi terkait neraca perusahaan tersebut.
5. Penerimaan responden perusahaan terhadap petugas dan kegiatan survei yang dilaksanakan oleh BPS cenderung masih rendah.
6. Kerangka sampel untuk beberapa perusahaan tidak up to date (masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak aktif yang masih masuk dalam kerangka sampel) sehingga tingkat non respon meningkat.
7. Survei dengan sistem ubinan, saat ini terkendala dengan ketersediaan sampel, karena sistem panen sebagian besar telah berubah dari pemanenan dengan sistem kelompok menjadi sistem tebas, sehingga jadwal panen sering terlewat.
8. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan beberapa survei sangat panjang sehingga menimbulkan data yang dihasilkan tidak obyektif.
9. Beberapa responden, baik responden rumah tangga maupun perusahaan terkena sampel untuk beberapa survei dengan tujuan yang berbeda.
10. Dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia perlu adanya penyesuaian dalam tatanan hidup baru pemerintahan.

Dari sisi peningkatan kualitas data, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Angka final yang akan dirilis oleh BPS daerah, dikirimkan ke daerah sangat berdekatan dengan waktu rilis sehingga waktu penyiapan bahan press rilis menjadi sangat singkat.
2. Petugas mitra yang membantu kegiatan BPS Kota Surabaya tidak berkelanjutan, sehingga proses transfer knowledge tidak berjalan dengan baik.
3. Kurangnya pemahaman petugas lapangan terutama petugas yang baru dilibatkan dalam kegiatan lapangan.
4. Penerimaan dokumen menumpuk pada akhir jadwal pelaksanaan, sehingga proses pemeriksaan data tidak berjalan dengan maksimal.
5. Buku pedoman belum dapat menjawab semua permasalahan lapangan yang ada.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan komunikasi ke BPS baik provinsi maupun pusat terkait jadwal pelaksanaan kegiatan yang tumpang tindih.
3. Keterbatasan jumlah sampel yang tersedia disikapi oleh BPS Kota Surabaya dengan cara mengoptimalkan pengumpulan fenomena yang bisa didapatkan melalui media internet dan pelaksanaan estimasi dengan menggunakan indikator lain yang bersesuaian. Peran pengumpulan fenomena ini sangat membantu meningkatkan

kualitas data yang dihasilkan karena dapat menjadi pembanding dari informasi yang berasal dari survei yang dilaksanakan.

4. Perekrutan petugas mitra dilaksanakan dengan selektif.
5. Untuk sampel ubinan, petugas menjalin hubungan yang baik dengan sumber data seperti atau petani yang menjadi target sampel.
6. Mengupayakan agar proses pengiriman data yang sudah selesai di tingkat petugas lapangan ke proses selanjutnya secara bertahap, sehingga tidak menumpuk pada akhir kegiatan.
7. Menyusun penegasan-penegasan untuk beberapa kasus yang tidak dijelaskan dalam Buku Pedoman.
8. Melakukan penjemputan atau kunjungan ulang ke perusahaan-perusahaan yang menjadi unit pendataan.
9. Dalam pelaksanaan pendataan dengan menggunakan protocol kesehatan yang ketat dalam mencegah penyebaran virus covid-19

Rencana Aksi

1. Menyusun matriks jadwal kerja yang memuat beban kerja petugas dan target waktu penyelesaian sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Secara terus-menerus melakukan identifikasi terhadap perusahaan yang ada di wilayah kerja petugas dengan melihat direktori yang tersedia maupun turun langsung ke lapangan, sehingga kerangka sampel yang tersedia menjadi up to date.
3. Lebih meningkatkan komunikasi dengan sumber-sumber data baik rumah tangga, perusahaan maupun instansi pemerintah.
4. Perlu dilaksanakan identifikasi petugas non organik/mitra yang dapat dilibatkan pada kegiatan sensus maupun survei BPS dalam setiap kesempatan.
5. Menjaga ikatan emosi dan memelihara hubungan baik dengan para mitra statistik.
6. Mengusulkan kepada BPS Pusat agar mengintegrasikan beberapa survei dengan objek atau tujuan yang serupa.
7. Mendokumentasikan dengan baik segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
8. Identifikasi resiko yang muncul yang diakibatkan karena waktu pelatihan yang terbatas dan penggunaan petugas baru.
9. Demi menjaga penyebaran covid-19 tidak meluas maka setiap pelaksana pendataan harus lolos uji bebas virus covid-19 dengan rapid tes, swab anti gen, dan perlengkapan alat perlindungan diri (apd).

Sasaran 2.1. : Sasaran Strategis Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Tabel. 9
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua BPS Kota Surabaya Tahun 2020

Sasaran Strategis		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS.2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1. Persentase K/L/D/I penyusunan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	50	50	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 2					100

Berdasarkan Tabel 6, sasaran strategis pada tujuan kedua yaitu: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN Sasaran strategis tersebut memiliki 1 (satu) indikator yang terukur.

Indikator pertama dari sasaran strategis pertama tujuan kedua adalah Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standard. Penanggungjawab dari indikator tersebut adalah seksi IPDS.

Formula penghitungannya adalah: $X/Y \times 100\%$

dimana:

X = Jumlah Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

Y = Jumlah konsumen data BPS

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Bidang IPDS, sumber datanya berasal dari Survei Kebutuhan Data dan Survei Kepuasan Konsumen yang dilakukan oleh BPS Kota Surabaya.

Sasaran 3.1.: Sasaran Strategis Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Dalam Penyelenggaraan SSN.

Tabel. 10
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kota Surabaya Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	3.1.1. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	15	13,8	92
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 3					92

Berdasarkan Tabel 7, sasaran strategis ketiga yaitu Penguatan statistik sektoral K/L/D/I. Indikator dari sasaran strategis tersebut adalah Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.

Tanggung jawab dalam penyediaan statistik sektoral dan statistik khusus sebenarnya terletak pada instansi/perusahaan terkait namun dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS. Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Bidang IPDS dan sumber datanya berasal dari laporan monitoring metadata sektoral dan khusus.

Pada tahun 2020, target jumlah K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK adalah sebanyak 13,8 persen atau setara dengan 4 (empat) K/L/D/I dari 29 OPD dengan realisasi sebanyak 13,8 persen sehingga capaian kinerja sebesar 92 persen.

Masalah/kendala yang dihadapi

Beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi terkait rendahnya capaian target di atas adalah instansi yang menjadi objek pendataan sampai batas akhir pengumpulan data belum memberikan jawaban terkait survei yang dilaksanakan.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Memberikan sosialisasi terhadap instansi/OPD sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan

instansi/OPD bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan kepada BPS Kota Surabaya.

Rencana Aksi

Terbentuknya forum data yang beranggotakan BPS Kabupaten kota dan instansi OPD.

Sasaran 4.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel

Tabel. 11
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kota Surabaya Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)
SS4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	4.1.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	64	49,61	77,51
	4.2.1. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 4					88,76

Berdasarkan Tabel 8, tujuan keempat dicapai dengan 1 (satu) sasaran strategis, yaitu SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan 2 (dua) indikator yang terukur.

Indikator pertama dari sasaran strategis pertama untuk tujuan keempat adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Penanggungjawab dari indikator di atas adalah seluruh seksi dan subbagian di lingkungan BPS Kota Surabaya. Sumber datanya berasal dari laporan hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat.

Pada tahun 2020, persentase hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat ditargetkan sebesar 64 point, dan telah terealisasi sebesar 49,61 point atau mencapai 77,51 persen dari target.

Penyusunan dokumen SAKIP di BPS Kota Surabaya diawali dengan kegiatan perencanaan kinerja. Rencana kinerja yang tersusun bertujuan untuk membantu dalam proses berakuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja organisasi serta mendorong pimpinan fokus dalam menjalankan strategi organisasi. Penyusunan rencana kinerja pada BPS Kota Surabaya dilakukan dengan mengundang seluruh pimpinan bagian bidang beserta tim SAKIP yang bertugas mengelola kegiatan SAKIP di Kota Surabaya. Dokumen yang dihasilkan berupa “rencana aksi/perjanjian kinerja” yang memuat target, output dan outcome yang akan dihasilkan oleh organisasi dalam setahun. Perencanaan kinerja tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan dari target yang telah ditetapkan, dilakukan pemantauan kinerja secara berkala setiap triwulan meskipun belum dilakukan secara optimal. Pemantauan kinerja bertujuan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan

Formula penghitungannya adalah: $X/Y \times 100\%$

Dimana:

X = Jumlah pengguna layanan yang merasa puas

Y = Jumlah Pengguna layanan

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah SubBagian Tata Usaha. Sumber datanya berasal dari Survei Kebutuhan Data dan Survei Kepuasan Konsumen yang dilakukan oleh BPS Kota Surabaya.

Tahun 2020 persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS terealisasi sebesar 100 persen.

Masalah/kendala yang dihadapi

1. Penetapan beberapa konsep definisi dan penetapan sumber data untuk pengelolaan SAKIP masih belum standar.
2. Hasil penilaian SAKIP inspektorat belum sepenuhnya dapat dipahami untuk dicarikan tindak lanjutnya.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

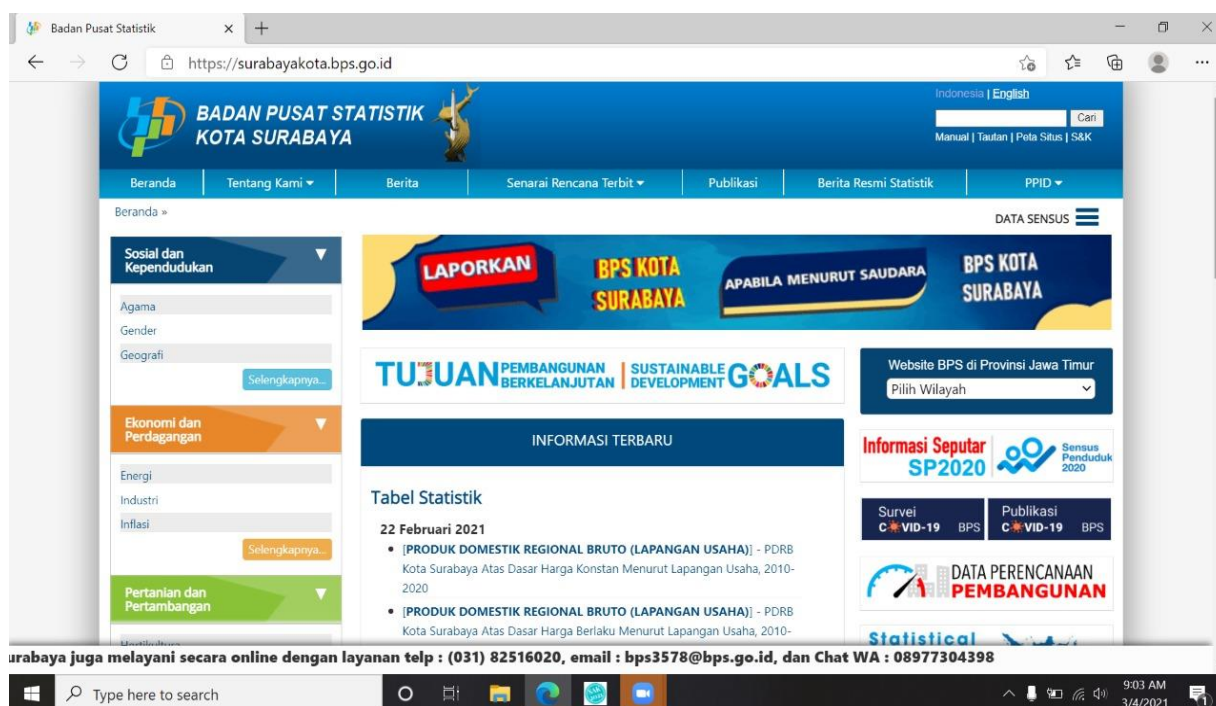
1. Meminta BPS Pusat khususnya bagian Monev, untuk mengadakan pembinaan tentang standar penyusunan dan penilaian SAKIP, khususnya terkait konsep definisi dan standar sumber data.

2. Menterjemahkan atau mendiskusikan lebih lanjut hasil evaluasi SAKIP inspektorat untuk dicarikan tindak lanjutnya.

Rencana Aksi

1. Peningkatan kemampuan SDM Tim SAKIP melalui pembinaan standar penyusunan dan penilaian SAKIP dengan narasumber yang kompeten.
2. Menetapkan batasan konsep definisi dan standar sumber data untuk pengelolaan SAKIP.
3. Melakukan review dokumen perencanaan secara berkala sehingga target yang ditetapkan dalam dokumen tersebut berjalan selaras.

Keinginan Masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa BPS Kota Surabaya harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan dan tepat waktu, oleh karena itu BPS Kota Surabaya berinovasi dalam diseminasi data dan informasi statistik diantaranya kemudahan akses layanan, interpretasi, dan penggunaan statistik oleh pengguna data. Kota Surabaya terkenal dengan kota Pendidikan dengan banyaknya perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Sehingga kebutuhan akan data di kota Surabaya cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain.



Gambar 4. Tampilan Website BPS Kota Surabaya

Pada sasaran meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data digunakan indikator pengunjung yang datang mencari informasi baik tatap muka langsung ataupun melalui media komunikasi lainnya jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik

masih dibawah Meskipun Sistem Pelayanan Statistik Terpadu (PST) telah mendorong mutu pelayanan data ke konsumen.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2020 terhadap tahun 2015 - 2019

Perkembangan capaian kinerja 2020 jika dibandingkan dengan periode Renstra 2014-2019 sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis 2015-2010

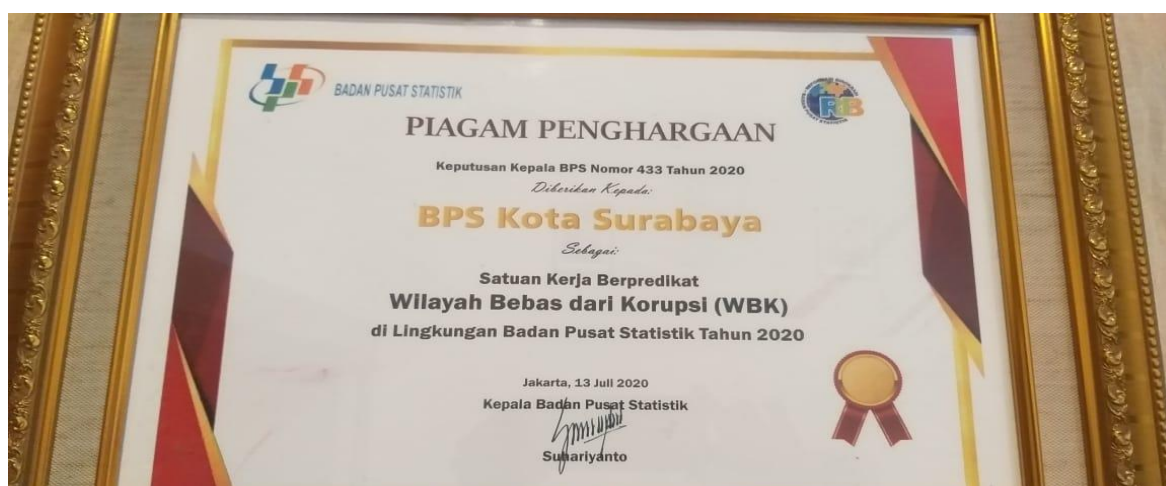
Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan	106,58	114,12	100,33	97,85	103,5	99,88
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis	110,20	114,98	103,4	100,6	108,7	98,93

Berdasarkan tabel diatas, secara umum rata-rata capaian kinerja Sasaran strategis selalu diatas 100 persen pada tahun 2020 turun dibandingkan tahun yang lalu pada tahun 2020 sebesar 98,93 persen dan tahun 2019 sebesar 108,7 persen tahun. Hal ini disebabkan perubahan penghitungan Metode Indikator Utama pada Renstra 2020-2024.

3.3 Prestasi BPS Kota Surabaya Tahun 2020

Pada tahun 2020, BPS Kota Surabaya mendapat penghargaan untuk masuk Nominasi sebagai satker berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari BPS RI.

Gambar 5. Piagam Penghargaan WBK dari BPS RI



Gambar 6. Piagam Penghargaan Pengelolaan Website dari BPS Provinsi Jawa Timur



Gambar 7. Piagam Penghargaan Performa Satuan Kerja dengan penanganan *under coverage* dari BPS Provinsi Jawa Timur



3.4 Kegiatan Prioritas Nasional BPS Kota Surabaya 2020

Pada Tahun 2020 Ada beberapa kegiatan besar/Prioritas Nasional di BPS Kota Surabaya pada tahun 2020 yaitu:

3.4.1 SENSUS PENDUDUK (SP) 2020

Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah sensus penduduk ke-7 sejak Indonesia merdeka. Sejak tahun 2019, persiapan SP2020 bidang berangka induk sudah dilakukan. Salah satu unit kerja yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pengembangan kerangka induk BPS adalah Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS) adalah melaksanakan penyusunan dan pengembangan kerangka induk. Kerangka induk

yang lengkap, akurat, relevan, dan mutakhir pada wilayah kerja statistik (wilkerstat) akan dijadikan dasar perencanaan dan pelaksanaan sensus dan survei BPS. Wilkerstat terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan blok sensus (BS). Kerangka induk yang dibuat BPS selama ini terdiri dari peta dan muatan BS. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kerangka induk terus dilakukan. Pada prinsipnya, kerangka induk yang dibangun adalah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan sensus dan survei BPS yang menggunakan berbagai macam metode statistik. Tahun 2019, Kegiatan Penyusunan Dasar dan Informasi Muatan Wilkerstat SP 2020 telah menghasilkan peta dasar SP2020 yang terdiri dari peta desa/kelurahan dan BS.

Pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2020 berbeda dengan enam sensus penduduk sebelumnya, pada SP2020 pencacahan lapangan menggunakan data bdasar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Dengan cara ini Sensus Penduduk (SP) 2020 dapat menghasilkan data dasar kependudukan yang sangat strategis dan terkini dalam rangka menuju satu data kependudukan Indonesia. Selain itu, untuk pertama kalinya pengumpulan data pada sensus penduduk dilakukan melalui beberapa cara pencacahan. Pertama, pengisian kuesioner secara online atau secara mandiri (Sensus Penduduk Online) melalui *website* atau disebut dengan CAWI (*Computer Aided Web Interviewing*). Kedua, pengisian kuesioner melalui wawancara oleh petugas menggunakan kuesioner.

Kegiatan Sensus Penduduk (SP) 2020 di BPS Kota Surabaya, Wilayah kerja BPS Kota Surabaya terdiri dari 31 Kecamatan, 154 Kelurahan, 1.368 Rukun Warga dan 9.118 Rukun Tetangga (SLS).

Tugas yang diemban BPS Kota Surabaya sangat berat dibandingkan BPS kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan tugas yang berat tersebut dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Organik dan dibantu oleh petugas mitra sebanyak 2.095 orang (125 Koseka dan 1.953 Petugas Sensus).

Sebagai gambaran secara garis besar pelaksanaan SP2020 BPS Kota Surabaya terbagi 4 tahap yaitu:

1. Koordinasi, Konsolidasi dan Sosialisasi

Sebelum pelaksanaan SP2020 BPS Kota Surabaya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dengan seluruh OPD yang terkait dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat Camat dijadikan Nara Sumber

Kasi Sosial dengan Pak Camat Pabean Cantian



Gambar 8. Plt. Kepala Kantor dengan jajaran staf di Kecamatan Rungkut



Gambar 9. Koordinasi Kepala BPS Kota Surabaya dengan Pemerintah Daerah



2. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 *Online* (Sensus Mandiri)

Sensus Penduduk 2020 online di laksanakan tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Sensus penduduk online Kota Surabaya mendominasi pengisian yang dilakukan oleh masyarakat. SP2020 online menggunakan teknologi *gadget* atau computer dan sebagai alternatif untuk masyarakat yang mobilitas tinggi yang sulit ditemui nanti pada saat sensus wawancara. Dari jumlah penduduk Kota Surabaya kurang lebih 2.874,3 ribu jiwa yang mengisi sensus *online* sebesar 348,1 ribu (12 %) melebihi target yang ditentukan oleh BPS RI. Dari hasil tersebut tidak lepas dari sosialisasi ke kecamatan dan kelurahan dengan mempraktekkan serta mengisi SP2020 *online*.

3. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 Wawancara

Sensus Penduduk 2020 Wawancara di laksanakan selama 1 bulan dari tanggal 1 sampai dengan 30 September 2020. Dengan kekuatan sumber daya manusia yang ada di BPS Kota Surabaya dari seluruh Pegawai Organik dan dibantu oleh petugas mitra sebanyak 2.095 orang (125 koseka dan 1.970 Pencacah lapangan) serta didampingi oleh Ketua RT (SLS) dan pengurus lainnya.

Foto Petugas melaksanakan Sensus Wawancara :





Sensus Night Kepala BPS Povinsi Jawa Timur dan Tim TF BPS Kota Surabaya di Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak.



4. Pengolahan SP2020

Pengolahan dokumen SP2020 dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan dilakukan secara *online*. Pengolahan secara online dibutuhkan karena saat menambahkan keluarga atau individu baru dalam daftar SP2020-DP, maka akan dilakukan pengecekan terhadap database seluruh penduduk Indonesia.

Tahapan pengolahan daftar SP2020-DP antara lain:

a. Pengolahan data pra-komputer

- Penerimaan dokumen (receiving);
- Pengelompokan dokumen (batching); dan
- Penuntingan/penyandian (editing/coding)

b. Pengolah data dengan computer;

- Pemindaian data (data capture/data entry);
- Tabulasi data (data tabulation); dan
- Export data persiapan untuk perekaman data C1

Dari kegiatan tersebut diatas BPS Kota Surabaya membutuhkan tenaga *Receiving batching* sebanyak 3 orang, *editing/coding* sebanyak 15 orang dan petugas *entry* sebanyak 115 orang. Khusus petugas *entry* karena jadwal pengolahan ditetapkan oleh BPS hanya 1 bulan maka diberlakukan sehari-semalam dengan 3 *shift*.



3.4.2 Kegiatan Pengumpulan data Statistik Tanaman Pangan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data mengenai tanaman pangan yang akurat, pada tahun 2020, BPS melaksanakan rangkaian pengumpulan data tanaman pangan yang terdiri dari Survei Pertanian Tanaman Pangan (Survei Ubinan) dan Pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi di pulau jawa dengan metode kerangka sampel area (Survei KSA).

Survei Ubinan dan Survei KSA dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, setelah sebelumnya Survei KSA pada tahun 2017 dilaksanakan hanya pada Pulau Jawa. Survei KSA merupakan salah satu terobosan dalam penyediaan data tanaman pangan dimana melibatkan teknologi terkini dan diharapkan dapat memperbaiki data pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut, BPS melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBPT) untuk menyusun kerangka sampel dan system pelaporan yang digunakan dalam pengumpulan data statistik pertanian yang berbasis teknologi.

a. Maksud dan Tujuan

Secara umum, pengumpulan data statistik tanaman pangan bertujuan untuk menghasilkan data statistik pertanian yang akurat, yang terbagi dalam tiga komponen, yaitu:

1. Survei Pertanian Tanaman Pangan
 - Menyediakan informasi luas tanaman padi dan palawija
 - Menyediakan informasi penggunaan lahan
 - Menyediakan informasi tentang alat dan mesin pertanian
 - Menyediakan informasi data perbenihan
2. Pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi di pulau Jawa dengan metode kerangka sampel area.
 - Memperbaiki metode pengumpulan data yang konvensional menjadi lebih objektif dan modern dengan melibatkan peran teknologi.

b. Pelaksanaan Lapangan

Penyediaan statistik tanaman pangan di Kota Surabaya terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Survei Pertanian Tanaman Pangan
2. Pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi di pulau jawa dengan metode kerangka sampel area.

b.i. Pelaksanaan Lapangan

Rangkaian survei pertanian tanaman pangan terdiri dari dua tahapan, yakni *listing/* pendaftaran rumah tangga dan pengumpulan data rata-rata produksi tanaman pangan.

- **Listing/pendaftaran rumah tangga**

Pendaftaran rumah tangga (listing) bertujuan membentuk kerangka sampel untuk pemilihan petak tanaman padi/palawija yang akan diukur produktivitasnya. Didalam pendaftaran rumah tangga dikumpulkan data tentang tanaman padi/palawija yang akan dipanen pada subround pengamatan.

Jadwal kegiatan listing untuk masing-masing subround sebagai berikut:

- Subround 1 pada bulan Desember 2019
- Subround 2 pada bulan April 2020
- Subround 3 pada bulan Agustus 2020

Jumlah seluruh blok sensus selama tahun 2020 adalah sebanyak 40 blok sensus dengan alokasi tiap-tiap subround adalah 14 blok sensus untuk subround 1, 14 blok sensus untuk subround 2 dan 12 blok sensus untuk subround 3. Daftar sampel blok sensus untuk masing-masing subround disajikan dalam lampiran.

Sebanyak 40 blok sensus dilakukan pemutakhiran oleh 4 (empat) orang petugas Mitra Statistik yang sudah diberikan briefing sebelum pelaksanaan lapangan. Pemutakhiran rumah tangga dilaksanakan dengan menggunakan daftar SUB-L dan peta WB-SP2010. Sebelum pelaksanaan lapangan, petugas terlebih dahulu melapor kepada ketua SLS setempat dengan dibekali surat tugas dan surat pengantar dari BPS Kota Surabaya.

- Penarikan sampel ubinan menurut jenis tanaman

Tahapan selanjutnya setelah daftar SUB-L selesai dientri dan divalidasi adalah penarikan sampel. Penarikan sampel menggunakan paket program dimana BPS mengirimkan target sampel blok sensus sebagai input untuk menjalankan paket program. Alokasi sampel ubinan menurut jenis tanaman dilakukan secara proporsional terhadap jumlah petak yang panen pada subround yang bersangkutan pada masing-masing jenis tanaman hasil listing pada BS terpilih. Namun pada subround 3 tahun 2019, khusus untuk komoditas padi sawah, sampel survei ubinan menggunakan sampel segmen dari Survei KSA, sehingga pada subround 3, penarikan sampel hanya dilakukan untuk komoditas selain padi sawah. Permasalahan muncul ketika pada akhir subround 3, yaitu bulan Desember, ternyata sampel dari segmen Survei KSA tidak memenuhi target alokasi dari pusat. Sehingga penarikan sampel tambahan untuk komoditas padi sawah perlu dilakukan.

- Pengumpulan data rata-rata produksi tanaman pangan

Pengumpulan data rata-rata produksi tanaman pangan menggunakan daftar SUB-S dengan mencatat hasil ubinan dan keterangan lainnya pada petak terpilih sesuai yang tercantum dalam daftar sampel. Adapun jadwal pelaksanaan pada masing-masing subround sebagai berikut:

- Subround 1 pada bulan Januari - April 2020
- Subround 2 pada bulan Mei - Agustus 2020
- Subround 3 pada bulan September - Desember 2020

Alokasi dan target ubinan untuk tiap-tiap subround disajikan dalam lampiran. Langkah-langkah pelaksanaan ubinan yakni persiapan, petugas berkomunikasi dengan rumah tangga sampel dan sinkronisasi jadwal panen. saat hari panen, pengambilan petak, pengambilan sampel plot, mencatat hasil ubinan dan data pelengkap (melakukan wawancara dengan pemilik lahan) dan mencatat pada daftar SUB-S. Alat-alat ubinan yang digunakan adalah pengukur plot, timbangan dan tripod.

Pengubinan dimulai dengan menentukan pangkal sumbu (dimulai dari barat daya dari petak lahan), menentukan titik pangkal ubinan (titik P), memasang alat plot ubinan, memanen/membersihkan, merontokkan dan menimbang. Memasang alat plot ubinan bujursangkar tidak dipasang diluar, apabila terkena rumpun ditusuk, tidak menggunakan tali memanen/membersihkan sesuai kebiasaan petani, jangan diarahkan, merontokkan padi sesuai kebiasaan petani termasuk alas/cara perontokan.

Hasil ubinan berupa daftar SUB-S diserahkan segera setelah panen dan dilaporkan bersamaan dengan laporan bulanan (SP-Padi dan SP-Palawija). Pengolahan hasil ubinan dimaksudkan untuk mendapatkan hasil per hektar dari masing-masing jenis tanaman padi dan palawija. hasil per hektar yang diperoleh akan mewakili satu subround (4 bulan), walaupun pelaksanaan dan pelaporan daftarnya dilakukan bulanan (ada panen).

b.ii PENDATAAN STATISTIK PERTANIAN TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DI PULAU JAWA DENGAN METODE KERANGKA SAMPEL AREA (KSA)

Pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi di pulau jawa dengan metode kerangka sampel area (KSA) pada tahun 2020 dilakukan dengan mengamati fase pertumbuhan tanaman padi pada sampel segmen. Dalam pelaksanaan KSA, survei lapangan merupakan bagian yang paling penting karena akan menentukan tingkat keakuratan yang dilaksanakan pada 7 (tujuh) hari terakhir di bulan pengamatan. Jika pada tahun 2017 pengamatan hanya dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, maka pada tahun 2020, pengamatan KSA dilaksanakan tiap bulan selama 7 hari terakhir pada bulan yang bersangkutan.

Instrumen yang digunakan pada survei KSA adalah sebagai berikut:

1. Paket dokumen, terdiri dari peta lingkungan sekitar, foto lingkungan sekitar dan foto segmen titik pengamatan.
2. Buku pedoman pelaksanaan Survei KSA.
3. Alat komunikasi (handphone) dengan spesifikasi minimal OS Android 3.x, kamera belakang 1 MP, RAM 1 GB, GPS berfungsi dan terdapat ruang penyimpanan kosong minimal 2 GB.
4. Sistem aplikasi KSA (KSA.apk) yang sudah terinstall dalam HP petugas, berfungsi merekam, menyimpan dan mengirimkan data pengamatan segmen.

Berbeda dengan survei yang dilaksanakan oleh BPS pada umumnya, pada survei KSA amatan menggunakan segmen, bukan blok sensus. Dimana satu buah segmen terdiri dari 9 (Sembilan) subsegmen yang berupa hamparan sawah berukuran 100 m x 100 m, sehingga amatan untuk satu segmen seluas 300 m x 300 m (9 hektare).



Gambar 10. Pencacah melaksanakan Ubinan Di Kota Surabaya

Dari sisi anggaran, kegiatan Survei Tanaman Pangan dengan Pagu sebesar Rp. 50.675.000,- yang terdiri dari Belanja bahan sebesar Rp.2.660.000,-; Honor Output kegiatan Rp. 23.995.000,-; Belanja Barang Non Operasional Lainnya Sebesar Rp. 9.017.000,- Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi sebesar Rp. 5.063.000,- Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp. 800.000,-; Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 1.670.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota sebesar Rp. 7.470.000,-. Dari Pagu Rp. 50.675.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.101.400,- atau 73,21 persen. Sedangkan untuk Pendataan Statistik Pertanian Tanaman pangan Terintegrasi (KSA) dengan pagu sebesar Rp. 23.370.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.156.000,- atau sebesar Rp. 99,08 persen.

3.4.3 Pelatihan Petugas Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan Kota Surabaya 2020

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan melalui Sakernas pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Hingga saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan baik waktu pelaksanaan, level estimasi, cakupan, maupun metodologinya. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan pusat Statistik (BPS) yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan. Hingga saat ini, sakernas mengalami berbagai perubahan baik waktu pelaksanaan, level estimasi, cakupan, maupun metodologi.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas sejak tahun 1984 menggunakan Konsep Dasar Angkatan Kerja (Standard Labour Force Concept). Pada tahun 2013, International Labour Organization (ILO) menyelenggarakan ICLS ke-19 yang menghasilkan beberapa pengembangan konsep definisi variabel-variabel ketenagakerjaan, serta menyesuaikan konsep aktivitas produktif (Work) dengan batasan produksi umum Sistem Neraca Nasional (SNA). Selain itu, pada saat ini isu ketenagakerjaan semakin berkembang. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengumpulkan data yang terkait dengan fenomena tersebut.

Perubahan konsep definisi dan ukuran-ukuran statistik ketenagakerjaan pada ICLS 19 dan perkembangan isu ketenagakerjaan menjadi latar belakang perlunya *redesign* kuesioner Sakernas, sehingga diharapkan akan lebih mampu menjawab tuntutan kebutuhan data ketenagakerjaan.

Pada kuesioner Sakernas 2020 ditambahkan beberapa variabel baru yang mengadopsi standar, ukuran, dan klasifikasi statistik ketenagakerjaan berbasis ICLS 19, selain itu juga terdapat beberapa variabel tambahan yang terkait dengan isu ketenagakerjaan seperti sektor formal informal, pekerjaan layak, pekerja berbasis rumahan, pekerja penyandang disabilitas, dan mobillitas tenaga kerja. Dengan kuesioner baru ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran umum kondisi ketenagakerjaan berdasarkan klasifikasi ICLS 19.

Data hasil Sakernas telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, kesinambungan ketersediaan dan kualitas data Sakernas harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Kualitas data hasil survey dipengaruhi oleh dua hal, yaitu *sampling error* dan *non sampling error*. Data yang berkualitas harus memiliki *sampling error* dan *non sampling error* yang serendah-rendahnya.

Sejalan dengan kualitas data yang ingin ditingkatkan, salah satu cara yang dilakukan adalah pelatihan petugas yang efektif dan efisien. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan pelatihan petugas, maka laporan pelatihan petugas ini disusun, antara lain menjelaskan tempat dilaksanakan pelatihan, jadwal pelatihan, materi pelatihan dan permasalahan selama pelatihan. Laporan ini dimaksudkan sebagai

pertanggungjawaban dari panitia penyelenggara. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BPS Kota Surabaya dalam melaksanakan pelatihan petugas selanjutnya.

Pelatihan Petugas Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan Kota Surabaya 2020 dilaksanakan mulai tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 30 Januari 2020. Pelatihan ini terdiri dari 4 sesi, dimana 3 sesi pada hari pertama, 1 sesi pada hari kedua. Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 17 orang. Pelatihan dilakukan pada pagi, siang, dan sore, dengan jumlah jam belajar sesuai yang ditetapkan. Hal ini dimaksud agar para peserta dapat menyerap semua materi yang telah diajarkan.

3.4.4 Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret Kota Surabaya 2020

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenar) menjadi sandaran utama untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan nasional agar sejalan dengan tujuan pembangunan internasional (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)). Susenar dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan potret kemajuan pembangunan. Potret tersebut harus akurat dan dipercaya oleh publik secara luas. Susenar Maret 2020 merupakan salah satu survei rutin BPS yang menyediakan data pembangunan di bidang sosial ekonomi pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Pada era *Sustainable Development Goals* (SDGs), data revolusi, Big data, dan Nawacita seperti sekarang ini, informasi capaian pembangunan merupakan sumber data utama bagi para pemangku kebijakan dalam merencanakan pembangunan merupakan sumber data utama bagi para pemangku kebijakan dalam merencanakan pembangunan nasional. Indikator statistik digunakan oleh kementerian/lembaga dan berbagai pihak untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pengukuran akuntabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator statistik sosial sangat diperlukan, terutama data berkesinambungan seperti data yang dihasilkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenar).

Susenar menjadi sandaran utama untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan nasional agar sejalan dengan tujuan pembangunan internasional (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs). Susenar dikumpulkan oleh badan pusat statistik (BPS) untuk memberikan potret kemajuan pembangunan. Potret tersebut harus akurat dan dapat dipercaya oleh publik secara luas.

Sejalan dengan kualitas data yang ingin ditingkatkan, salah satu cara yang dilakukan adalah pelatihan petugas yang efektif dan efisien. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan pelatihan petugas, maka laporan pelatihan petugas ini disusun,

antara lain menjelaskan tempat dilaksanakan pelatihan, jadwal pelatihan, materi pelatihan dan permasalahan selama pelatihan. Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban dari panitia penyelenggara. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BPS Kota Surabaya dalam melaksanakan pelatihan petugas selanjutnya.

Maksud dan Tujuan

Secara umum tujuan Pelatihan petugas Susenas Maret 2020 Kota Surabaya 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami latar belakang dan tujuan Susenas maret 2020.
- 2) Memahami peran dan ruang lingkup tugas yang dilakukan oleh Petugas Susenas Maret 2020.
- 3) Memahami hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan tugas dilapangan.
- 4) Memahami cakupan materi pelatihan.
- 5) Memahami dan mampu menerapkan metode pencacahan yang efektif dan tidak membosankan responden.

3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Pagu awal yang diberikan ke BPS kota Surabaya untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp. 40.665.646.000,-, terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Kota Surabaya pada tahun 2020 dibiayai dengan APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2020, dengan nilai pagu sesuai revisi DIPA terakhir sebesar Rp. 16.922.937.000,- yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya BPS sebesar Rp. 7.154.985.000,- dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Rp. 9.767.952.000,-. Dari pagu tersebut, realisasinya pada tahun 2020 sebesar Rp. 15.166.883.934,- atau 89,82 persen. Realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 91,06 persen.

Tabel 12.

**Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program pada
BPS Kota Surabaya Tahun 2020**

Program	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran
DMPTTL	7,443,353,000	7,154,985,000	6,539,876,396	91,4	615,108,604
PPIS	33,222,293,000	9.767.952,000	8,660,007,538	88,66	1,107,944,462
JUMLAH	40,665,646,000	16,922,937,000	15,199,883,934	89,82	1,723,053,066

Berdasarkan tabel diatas, penyerapan anggaran program DMPTTL adalah sebesar 91,4 persen dari pagu anggaran program DMPTTL, penyerapan anggaran program PPIS adalah sebesar 88,66 persen dari pagu anggaran program PPIS

Rendahnya penyerapan anggaran pada program pelayanan informasi statistik (PPIS) jika dibandingkan dengan DMPTTL, diantaranya karena kondisi saat ini covid-19 Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yang tidak memungkinkan sehingga biaya honor, transport lokal tidak dicairkan dan Anggaran Nasional Sensus Penduduk tidak boleh digunakan ke program yang lain sehingga tidak dapat direvisi sampai akhir tahun.

Hal ini mencerminkan bahwa BPS Kota Surabaya telah berhasil melakukan efisiensi penganggaran sesuai tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja. Atau secara umum dapat dikatakan efektifitas dan efisiensi anggaran tahun 2020 sudah terlaksana dengan baik.

Kendala-kendala yang terjadi dalam proses penyerapan dana ini antara lain:

- Sangat lambatnya pemasukan dokumen lapangan, khususnya dokumen industri besar/sedang, disamping secara kuantitas dibawah target jumlah yang direncanakan sehingga penyerapan anggaran tidak optimal. Atau biasanya target terpenuhi akan tetapi sudah melampaui akhir tahun.
- Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga biaya honor tidak mungkin dicairkan.
- Dana operasional dimasing-masing kegiatan masih banyak yang belum terserap meskipun kegiatan kegiatan tersebut telah dapat diselesaikan dengan optimal.
- Perencanaan anggaran di awal tahun yang kadang tidak sesuai dengan jadwal kegiatan-kegiatan/program yang ada di POK 2020 atau DIP.

3.6. Upaya Efisiensi di BPS Kota Surabaya Tahun 2020

Upaya penghematan anggaran dengan tidak merubah target kinerja dilakukan sebagai bagian efisiensi yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah. BPS Kota Surabaya juga melakukan upaya efisiensi sesuai petunjuk dari BPS RI, upaya efisiensi antara lain mengurangi belanja operasional. Antara lain operasional paket meeting, belanja bahan, perjadin/transport local pemeriksaan petugas lapangan oleh organik BPS secara terintegrasi dengan melakukan '*self blocking*'.

3.6.1 Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2020

Rumusan tujuan BPS Kota Surabaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi BPS Kota Surabaya. Selain tujuan ada sasaran, sasaran disini merupakan rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Efisiensi disini diartikan sebagai pemakaian anggaran dengan tolok ukur realisasi anggaran pada tahun 2020 dibandingkan dengan capaian kinerja yang telah tercapai. Pada tahun 2020 Capaian Indikator tujuan Kinerja BPS Kota Surabaya sebesar 99,88 persen sedangkan capaian indikator sasaran BPS Kota Surabaya sebesar 98,93 persen. Dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2020 dengan Pagu sebesar Rp. 16,922,937,000,- dan realisasi Rp. 15.199.883.934,- terealisasi sebesar 89,82 persen.

4.1 Tinjauan Umum

Akuntabilitas kinerja BPS Kota Surabaya merupakan perwujudan kewajiban BPS Kota Surabaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan Sasaran, yang telah ditetapkan dalam APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 054 Tahun 2020, Secara periodik selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS kota Surabaya dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang terdiri dari 4 (empat) tujuan yang meliputi 5 (lima) sasaran strategis. Sesuai dengan visi-nya, BPS Kota Surabaya sebagai pelopor penyedia data statistik terpercaya untuk semua, hal ini dicerminkan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS Kota Surabaya tahun 2020 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 99,88 persen dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 98,93 persendengan rincian sebagai berikut:

- Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statisitik dengan indikator kinerja persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik peningkatan kualitas data statistik mencapai 130 persen.
- Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik dengan indikator kinerja persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS mencapai 100 persen Tujuan 3. Penguatan system Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik dengan sasaran jumlah metada kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun dengan capaian kinerja sebesar 92 persen dengan target yang ditetapkan sebesar 15 persen.
- Tujuan 3. Penguatan sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik dengan sasaran jumlah metada kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun dengan capaian kinerja sebesar 92 persen dengan target yang ditetapkan sebesar 15 persen.
- Tujuan 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel dengan 2 indikator sasaran yaitu:
- Meningkatnya birokrasi yang akuntabel dengan sasaran hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat
 - Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS

Pada tahun 2020 Capaian Indikator tujuan Kinerja BPS kota Surabaya sebesar 99,88 persen sedangkan capaian indikator sasaran BPS Kota Surabaya sebesar 98,93 persen. Dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2020 dengan Pagu sebesar Rp. 15.199.883.934,- terealisasi sebesar 89,82 persen.

BPS Kota Surabaya telah berupaya meningkatkan perannya dalam menyediakan statistik berkualitas yang tercermin dari capaian indikator kinerja meskipun sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2 Tantangan dan Kendala Utama

Secara umum BPS Kota Surabaya telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan tujuan, sasaran strategis serta indikator kinerja. Namun di tengah pencapaian tersebut beberapa tantangan yang dihadapi selama tahun 2020 dan tahun-tahun kedepan diantaranya;

1. Peran BPS yang Semakin vital menuntut BPS senantiasa mampu menyediakan data rutin (bulanan, triwulanan dan tahunan) yang tepat waktu dan berkualitas dan tetap menjaga independensi BPS sebagai instansi penyedia data.
2. Tuntutan pengembangan statistik sesuai dengan program kerja pemerintah dan mengakomodir kebutuhan data (khususnya data dasar) bagi para pengguna data.
3. Koordinasi dengan SKPD/instansi dalam rangka pembinaan dan peningkatan di bidang statistic.
4. Pemanfaatan IT dalam proses bisnis yang dilaksanakan oleh BPS Kota Surabaya.
5. Tuntutan penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel yang terus meningkat.

4.3 Saran Tindak Lanjut

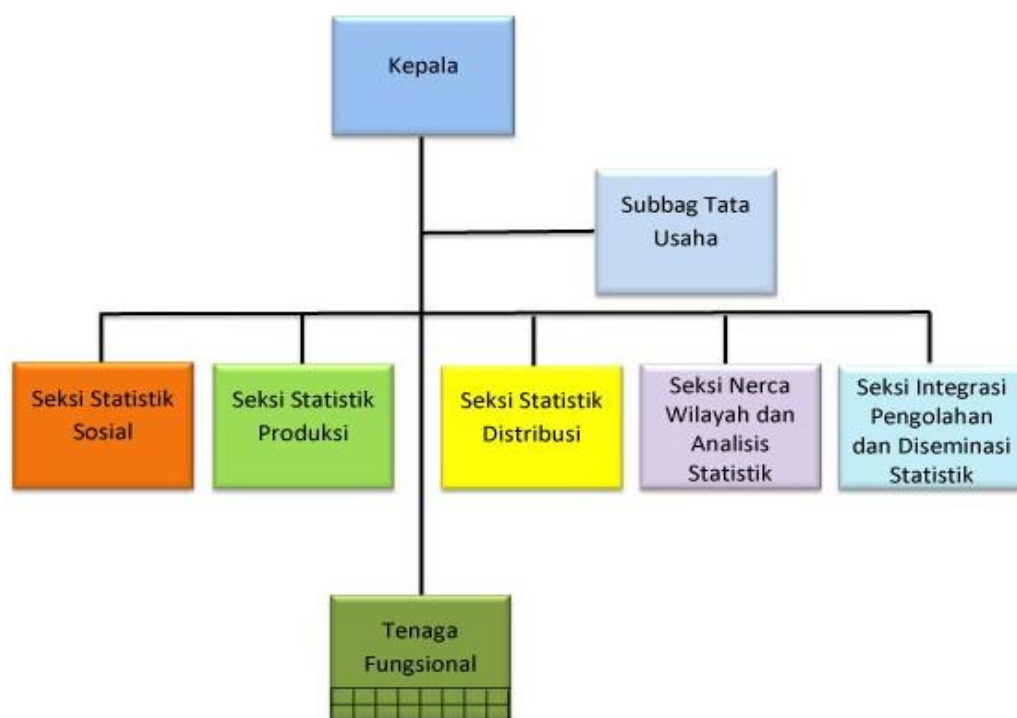
Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah:

- a. Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf dengan mengikutkan pada pelatihan dan seminar. Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 guna peningkatan mutu.
- b. Menambah dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana, agar dapat dicapai hasil yang lebih optimal.
- c. Mempercepat pencairan anggaran agar tepat waktu sehingga tidak menghambat kegiatan-kegiatan statistic.
- d. Menjaga ikatan emosi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna dan sumber data (*user* maupun responden *engagement*)
- e. Mendokumentasikan setiap upaya yang dilakukan terkait dengan perbaikan kualitas data.
- f. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada konsumen, antara lain melakukan sinkronisasi dan ketepatan waktu dari setiap unit kerja terkait sebagai produsen data dan publikasi.

- g. Meningkatkan mutu dan kuantitas pemasyarakatan informasi statistik, agar informasi statistik yang dihasilkan dapat lebih menyeluruh, lengkap dan akurat sehingga tepat untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan penting.
- h. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait; dengan maksud agar dapat mengajak serta pemerintah daerah terkait; dengan maksud agar dapat mengajak serta pemerintah daerah dalam menggerakkan peran serta masyarakat dalam kegiatan statistik.
- i. Perlunya koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi di tingkat pusat untuk berbagai kegiatan BPS, agar BPS daerah selaku pengumpul data lapangan dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditargetkan. Serta perencanaan terintegrasi di BPS RI agar survei yang dilakukan tidak memberatkan responden maupun petugas, dengan merancang kuesioner yang sederhana.
- j. Melakukan sosialisasi kegiatan survei yang dilaksanakan dengan tepat sasaran.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Susunan Organisasi BPS Kota Surabaya



Lampiran 2. Rencana Strategis BPS Kota Surabaya 2020-2024

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	50	51	53	54	55	IPDS
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	4,87	6	7	9	10	Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, Nerwilis
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan komitmen K/L/D /I thdp SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	100	100	100	100	100	IPDS
		Persentase K/L/D/I penyusunan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	50	60	65	65	70	IPDS
3.	Penguatan Sistem Statistik Nasioanl melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik							
	Meningkatkan koordinasi & kerjasama dlm penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	15	17	20	25	30	Sosial, Produksi, Distribusi, IPDS, dan Nerwilis
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang unggul & berdaya saing dlm kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat	64	66	70	74	80	Tata Usaha
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	100	100	100	100	100	Tata Usaha

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2020

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	50
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	4,87
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	100
	Persentase K/L/D/I penyusunan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	50
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN		
3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	15
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	100

Program		Anggaran	
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tugas lainnya BPS	Rp.	4.176.352.000,-
2.	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp.	3.458.115.000,-
		Rp.	7.634.467.000,-

Surabaya, 25 September 2020

Kepala BPS Kota Surabaya

Kepala BPS Provinsi



DADANG HARDIWAN, S.Si, M.Si.
NIP. 19720609 199412 1 001



AGUS BUDI SANTOSO, SE

**JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KOTA SURABAYA MENURUT JENJANG
PENDIDIKAN TAHUN 2020**

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan						Total
		SMP	≤SMA	D3	DIV/S1	S2	S3	
1	Kepala	0	0	0	1	0	0	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	0	1	1	2	1	0	5
3	Seksi Statistik Sosial	0	0	0	2	2	0	4
4	Seksi Statistik Produksi	0	1	0	4	0	0	5
5	Seksi Statistik Distribusi	0	0	0	3	1	0	4
6	Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik	0	0	0	2	1	0	3
7	Seksi Integrasi Pengolahan Dan Diseminasi Statistik	0	0	0	3	0	0	3
8	Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)	0	5	5	4	5	0	19
9	Tugas Belajar	0	0	0	1	0	0	1
10	Satpam dan Pramubakti	0	5	0	0	0	0	5
Jumlah		0	12	6	26	6	0	50

**JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KOTA SURABAYA
MENURUT JENIS JABATAN dan KELOMPOK UMUR TAHUN 2020**

No.	JENIS JABATAN	Kelompok Umur										Jumlah
		<=20	21-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-56	57	
1	Eselon II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Eselon III	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	Eselon IV	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	6
4	Fungsional	0	0	0	7	1	2	8	0	0	2	20
5	Staf Non Fungsional	0	0	0	1	7	4	1	0	1	4	18
6	Jasa Keamanan /Cleaning Service	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	5
Jumlah		0	0	0	10	8	10	10	1	4	7	50

**JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KOTA SURABAYA
MENURUT PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2020**

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Jasa keamanan/Cleaning Service	-	5
2.	Juru Muda	I/a	-
3.	Juru Muda Tk. I	I/b	-
4.	Juru	I/c	-
5.	Juru Tk. I	I/d	-
6.	Pengatur Muda	II/a	-
7.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
8.	Pengatur	II/c	-
9	Pengatur TK. I	II/d	3
10.	Penata Muda	III/a	9
11.	Penata Muda Tk. I	III/b	8
12.	Penata	III/c	9
13.	Penata Tk. I	III/d	1 1
14.	Pembina	IV/a	4
15.	Pembina Tk. I	IV/b	1
16.	Pembina Utama Muda	IV/c	-
17	Pembina Utama Madya	IV/d	-
18	Pembina Utama	IV/e	-
Jumlah			50

**JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KOTA SURABAYA
MENURUT JENIS BATASAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2020**

No.	Unit Organisasi	Jenis Jabatan						Jumlah
		Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Non Fungsional	Staf	Mitra	
1	Kepala	1	0	0	0	0	0	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	0	1	0	0	4	0	5
3	Seksi Statistik Sosial	0	1	1	0	2	0	4
4	Seksi Statistik Produksi	0	1	0	0	4	0	5
5	Seksi Statistik Distribusi	0	1	3	0	0	0	4
6	Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	0	1	1	0	1	0	3
7	Seksi Integrasi Pengolahan dan	0	1	1	0	1	0	3
8	Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)	0	0	14	5	0	0	19
9	Tugas Belajar	0	0	0	0	1	0	1
10	Mitra / Penjaga Malam	0	0	0	0	0	5	5
Jumlah		1	6	20	5	13	5	50

**JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KOTA SURABAYA
MENURUT GOLONGAN DAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2020**

No.	Unit Organisasi	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	-	
1	Kepala	1	0	0	0	0	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	1	3	1	0	0	5
3	Seksi Statistik Sosial	1	3	0	0	0	4
4	Seksi Statistik Produksi	0	5	0	0	0	5
5	Seksi Statistik Distribusi	1	3	0	0	0	4
6	Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	1	3	0	0	0	4
7	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi	0	3	0	0	0	3
8	Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)	0	1	2	0	0	19
9.	Mitra / Penjaga Malam	0	0	0	0	5	6
	Jumlah	5	37	3	0	5	50

Lampiran 5. Kegiatan BPS 2020

No.	Kegiatan	Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Peningkatan Kualitas Dan												
2	Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus												
3	Pemutakhiran Peta												
4	Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis Web.												
5	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran												
6	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan												
7	Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor Dan												
8	Survei Perilaku Anti												
9	SUNENAS Modul												
10	Survei Prilaku Peduli												
11	Penyusunan Statistik												
12	Survei Pertanian Tanaman												
13	Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi di pulau Jawa dengan Metode												
14	Survei Struktur Ongkos												
15	Survei Luas Panen Dan Luas Lahan Untuk												
16	Survei Hortikultura Dan												
17	Survei Perusahaan												
18	Survei Perusahaan												
19	Survei Perusahaan												
20	Survei Industri												
21	Survei Industri												

No.	Kegiatan	Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
22	Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power, Dan Updating												
23	Survei Konstruksi												
24	Kompilasi Data												
25	Survei Angkutan Penumpang dan Barang di												
26	SBH 2019												
27	Indeks Kemahalan												
28	Survei Harga Konsumen Dan Survei Volume												
29	Survei Statistik Badan												
30	Survei Statistik Keuangan												
31	Survei Bidang Jasa Pariwisata												
32	Penyusunan PDRB Tahunan Dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha												
33	Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga Dan Institusi Nirlaba Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi												
34	Indeks Tendensi bisnis dan indeks tendensi konsumen												
35	Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan Dan Tahunan												
36	Persiapan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja												
37	Survei Statistik Wisatawan												
	Survei Pertaian Antar												
39	Survei Penyusunan Disagregasi PMTB menurut Institusi dan lapangan												

Lampiran 6. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2020

MAILING LIST PUBLIKASI BPS KOTA SURABAYA TAHUN 2020

No.	Jenis Publikasi	Jumlah Judul
1.	Kota Surabaya Dalam Angka tahun 2020	1
2.	Kecamatan Dalam Angka tahun 2020	31
3.	Laporan Eksekutif PODES	1
4.	Inflasi Kota Surabaya 2020	1
5.	Statistik Daerah Kota Surabaya	1
6.	PDRB Kota Surabaya menurut pengeluaran 2015-2019	1
7.	PDRB Kota Surabaya menurut Pengeluaran 2015-2019	1
8.	Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020	1
9.	Laporan Eksekutif Ketenagakerjaan 2020	1
10.	Laporan Eksekutif Kesejahteraan Rakyat 2020	1
11.	Statistik Hortikultura Kota Surabaya Tahun 2019	1
12.	Berita Resmi Statistik Bulanan	12

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SURABAYA**